

**REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN DALAM PARTAI
POLITIK**

**(Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten
Jepara tahun 2011-2019)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Liana Oktavia Ningrum

1906016070

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi:

Nama : Liana Oktavia Ningrum

NIM : 1906016070

Jur. : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Rekrutmen Politik Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I



Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK
(Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten
Jepara tahun 2011-2019)

Disusun Oleh:

Liana Oktavia Ningrum

1906016070

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal, 26 Juni 2023
dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.

NIP. 197809302003121001

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rofiq'.

Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

Penguji Utama I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Nuqlir Bariklana'.

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rofiq'.

Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Juni 2023



Liana Oktavia Ningrum

NIM. 1906016070

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik (Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku Wakil dekan II dan Bapak Dr. Moh Khasan, M.Ag. selaku Wakil dekan III.
4. Bapak Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Rofiq, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu memberikan masukan, memberi motivasi dan percaya diri penulis, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang

telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menjalani perkuliahan.

7. Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dan Ibu Drs.Farah Elfirajun Ag, selaku Ketua Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
8. Kedua orangtua penulis Ayahanda tercinta Mis Minarso dan Ibunda tersayang Rokhayati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
9. Krisna Murti Nur Sasongko selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada saudara penulis tanteku tersayang Arovah dan Sulis Aprilia Al Muharromah yang sudah memberikan tempat tinggal yang nyaman lengkap beserta kasih sayang tanpa batas kepada penulis.
11. Sahabat penulis Aliya Qorry A'ina, Annisa Try Wahyuni dan Hanum Salsabila yang telah membantu dan mendoakan serta memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar UKM Walisongo Sport Club UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengembangkan bakat dan meraih prestasi serta merasakan kehangatan keluarga di Semarang.
13. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama teman-teman sekelas Ilmu Politik B yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus Program Studi Ilmu Politik.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Liana Oktavia Ningrum

NIM 1906016070

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling pantas untuk mengawali kalimat ini, selain sukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang spesial dan terkasih yang sangat berjasa dalam hal ini, kepada Orang tuaku Bapak Mis Minarso dan Ibu Rokhayati tersayang dan saudaraku Krisna Murti Nur Sasongko. Terima kasih atas doa dan kasih sayang serta pengorbanan baik moril maupun materil yang diberikan secara tulus selama ini kepadaku tanpa mengeluh sedikitpun, dan terima kasih kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo.

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya “

[Qs. At-Talaq : 4]

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

-Ali bin Abi Thalib-

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang rekrutmen politik perempuan dalam partai politik yang dilakukan oleh Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan terkait sistem perekrutan anggota perempuan dalam Garda Wanita Malahayati dan dampak diberlakukannya sistem perekrutan tersebut terhadap komposisi perempuan di Partai Nasdem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan melalui analisis secara deskriptif, untuk menggambarkan sistem perekrutan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dalam merekrut calon anggota partai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara sebagai data primer dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah teori gender dari Mansour Fakih.

Penelitian kualitatif ini membuktikan bahwa sistem perekrutan anggota perempuan dalam Garda Wanita Malahayati yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Jepara bersifat semi terbuka atau pola campuran yakni sistem rekrutmen secara terbuka dan secara tertutup. Dalam proses perekrutan anggota, Partai Nasdem mengedepankan prinsip demokratis untuk menghasilkan kandidat politik yang berkualitas yang memiliki kapasitas, legitimasi, integritas dan modal sosial di masyarakat. Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem jelas sangat memperhatikan keberadaan perempuan dengan adanya program kerja berbasis kesetaraan gender yang melibatkan peran perempuan dalam berbagai proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Partai Nasdem yakin bahwa upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat terwujud apabila didukung dengan berbagai aturan yang mengutamakan pemenuhan hak perempuan dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya diharapkan kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat semakin mendorong peningkatan partisipasi perempuan.

Diberlakukannya sistem perekrutan politik bagi komposisi perempuan dalam Partai Nasdem Kabupaten Jepara sangat berdampak secara signifikan terutama dalam penguatan posisi serta komposisi perempuan dalam partai. Dampak tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan komposisi perempuan dalam keterwakilan di parlemen dalam proses pengambilan suara serta peningkatan jumlah anggota perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum. Peran politik perempuan menjadi faktor pendorong dan penguat posisi perempuan dalam partai, walaupun belum sepenuhnya membawa kontribusi, karena kebijakan yang dihasilkan cenderung hanya mengikuti keinginan elit politik. Namun, dengan adanya peran perempuan dalam dunia politik dianggap sudah cukup untuk mewakili suara perempuan.

Kata Kunci : Partai Nasdem, Sistem Rekrutmen Perempuan, Peran Politik Perempuan

ABSTRACT

This thesis discusses the political recruitment of women in political parties conducted by the Garda Wanita Malahayati Nasdem Party, Jepara Regency. This study aims to explain and describe the system of recruiting female members in the Malahayati Women's Guard and the impact of implementing this recruitment system on the composition of women in the Nasdem Party. This study uses a type of qualitative research with an approach method through descriptive analysis, to describe the recruitment system carried out by the Nasdem Party in recruiting candidate party members. Data collection techniques were carried out through an interview process as primary data and secondary data were obtained through library research. While the theory used by the author is the theory of gender from Mansour Fakih.

This qualitative research proves that the recruitment system for female members in the Malahayati Women's Guard conducted by the Nasdem Party in Jepara Regency is semi-open or a mixed pattern, namely an open and closed recruitment system. In the process of recruiting members, the Nasdem Party prioritizes democratic principles to produce quality political candidates who have capacity, legitimacy, integrity and social capital in society. The recruitment system carried out by the Nasdem Party clearly pays close attention to the existence of women with a work program based on gender equality which involves the role of women in various policy-making and decision-making processes. The Nasdem Party believes that efforts to realize gender equality can be realized if it is supported by various regulations that prioritize the fulfillment of women's and children's rights. In its implementation, it is hoped that this policy will receive support from various parties, so that it can further encourage increased women's participation.

The implementation of a political recruitment system for the composition of women in the Jepara District Nasdem Party has had a significant impact, especially in strengthening the position and composition of women in the party. This impact is demonstrated by an increase in the composition of women in parliamentary representation in the voting process and an increase in the number of female members elected in general elections. The political role of women is a driving factor and strengthens the position of women in parties, although it has not fully contributed, because the resulting policies tend to only follow the wishes of the political elite. However, the presence of women's role in politics is considered sufficient to represent women's voices.

Keywords: Nasdem Party, Women's Recruitment System, Women's Political Role

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK	17
A. Penjelasan Konsep	17
B. Teori Gender Mansour Fakih.....	22
C. Teori Organisasi Kolateral Partai Thomas Poguntke	28

BAB III.....	40
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI KABUPATEN JEPARA	40
A. Sejarah Partai Nasional Demokrat	40
B. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jepara	45
C. Garda Wanita Malahayati Nasdem Kabupaten Jepara.....	47
BAB IV	52
SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA PEREMPUAN GARDA WANITA MALAHAYATI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI KABUPATEN JEPARA	52
A. Sistem Perekrutan Anggota Perempuan Dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem.....	52
B. Hambatan dan Tantangan Proses Rekrutmen Politik Perempuan.....	66
BAB V.....	70
DAMPAK DIBERLAKUKANNYA SISTEM PEREKRUTAN TERHADAP KOMPOSISI PEREMPUAN DI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	70
A. Dampak Sistem Perekrutan Terhadap Komposisi Perempuan Di Partai Nasdem.....	70
B. Peran Perempuan dalam Partai Nasdem Kabupaten Jepara	74
C. Analisis Terhadap Teori Kolateral Partai Thomas Poguntke.....	88
BAB VI	95
KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Organisasi Kolateral Partai	29
Tabel 2 Struktur Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Jepara	46
Tabel 3 Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lambang Gambar Partai Nasdem dan Garda Wanita Malahayati	41
Gambar 2 Launching dan Sarasehan Posko Pengaduan Kekerasan Seksual dan KDRT.....	78
Gambar 3 Proses Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia oleh Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara.....	80
Gambar 4 Konsolidasi dan Pelantikan Pengurus Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara	83
Gambar 5 Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jepara	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Ibu Dra. Farah Elfirajun. AG selaku Ketua Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara	102
Lampiran 2 Wawancara dengan Ibu Rita Haryani S.Pd selaku Sekretaris Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara	102
Lampiran 3 Wawancara dengan Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara	103
Lampiran 4 Wawancara dengan team seleksi DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara	103
Lampiran 5 Wawancara dengan sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara	104
Lampiran 6 Kantor Sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara.....	104
Lampiran 7 Surat pengajuan penelitian di DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara	105
Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Penelitian di DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara.....	106
Lampiran 9 Daftar pedoman pertanyaan untuk Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem negara demokrasi di Indonesia, partai politik merupakan pengantar bagi warga negara dengan pemerintahan. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi yang memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan dan keputusan politik yang dibentuk oleh pemerintah. Partai politik menjadi akses penghubung bagi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam bidang politik. Keberadaan perempuan yang memiliki akses berpolitik sangat diperlukan, terutama dalam partai politik sehingga kepentingan-kepentingan mereka dapat diperjuangkan.

Fenomena peran perempuan dalam partai politik sangat penting terutama dalam pelaksanaan komunikasi politik, pendidikan politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik serta menjadi penghubung bagi para elit politik perempuan, untuk saling memberikan dukungan kepada sesama kaum perempuan dalam proses pencalonan diri agar dapat menempati jabatan dalam pemerintahan. Bukan hanya sebagai upaya untuk memperkuat partisipasi politik dan meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik, keberhasilan dalam kinerja perempuan di bidang politik jelas tidak dapat dihindarkan. Terbukanya perspektif dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan keharusan dalam pembangunan demokrasi serta kontribusi dalam tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik.

Sebagai contoh implementasi peran perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai bersifat inklusif yang mengakomodir segala kepentingan perempuan dalam politik. Hal ini ditandai dengan adanya draft aturan terkait gender dalam konstitusi dalam partai tersebut, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan perempuan dalam jabatan yang penting dan strategis dalam struktur partai

maupun di lembaga legislative. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya melalui organisasi sayap perempuan yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam partai politik sangat penting untuk memperbaiki kinerja dan mengawasi perkembangan agenda politik, serta memonitor isu-isu perempuan dalam sistem politik.

Kajian tentang peran politik perempuan telah dilakukan oleh banyak ahli antara lain Bambang Arianto (2019), yang mengkaji tentang peran politik perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang peran sayap politik perempuan yang ada di partai Nasdem yaitu Garnita Malahayati Yogyakarta. Realitasnya berbagai kebijakan affirmative action yang diupayakan oleh pemerintah belum dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh partai politik, terutama dalam menciptakan ruang lingkungan politik secara terbuka bagi perempuan, sehingga dapat menimbulkan politis perempuan yang unggul. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai kesulitan yang sering dialami oleh partai politik terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keutamaan gender dan pendidikan politik berbasis kesetaraan gender. Terjadi disfungsi dalam sayap politik perempuan, karena Garnita Malahayati belum dapat terlembaga secara baik. Sehingga perempuan belum dapat berperan secara penuh untuk mendorong proses kandidasi dalam kaderisasi politisi perempuan (Arianto, 2019).

Rencana penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bambang Arianto (2019), penelitian ini akan meneliti tentang Garda Wanita (Garnita) Malahayati Partai Nasdem di Kabupaten Jepara. Peran Perempuan dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara bertujuan untuk menarik partisipasi politik dan memberikan fasilitas kepada perempuan untuk melakukan konsolidasi melalui berbagai kegiatan. Para kader dan elit perempuan berperan penting dalam menyampaikan sosialisasi terkait kehadiran Partai Nasdem dan memperkenalkan Partai Nasdem secara

luas kepada masyarakat di kabupaten Jepara. Partisipasi politik perempuan di Partai Nasdem berperan penting dalam penguatan posisi perempuan. Sehingga berdampak terhadap keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan.

Garda Wanita Malahayati (Garnita) menjadikan hubungan antara masyarakat dengan Partai Nasdem semakin erat, melalui kegiatan sosial yang dilakukan sebagai pengenalan Partai Nasdem secara luas kepada masyarakat. Kegiatan ini difokuskan kepada kaum perempuan yang berpotensi untuk terjun dalam bidang politik, sehingga dapat menjadi motivasi bagi kaum perempuan lainnya untuk dapat berjuang dan bersaing menjadi politisi. Partai politik memiliki fungsi krusial sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengelolaan kehidupan bernegara. Salah satu fungsi partai politik tersebut adalah perekrutan politik. Perekrutan politik merupakan salah satu fungsi partai yang eksklusif dan sangat penting sehingga tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen, kedudukan dan peran perempuan dalam partai politik jelas belum mendapatkan porsi yang seimbang. Oleh karena itu Garda Wanita Malahayati (Garnita) berfungsi sebagai sarana rekrutmen politisi perempuan dan menjadi penghubung bagi perempuan agar dapat menempati jabatan dalam pemerintahan. Partai Nasdem memberikan ruang yang sangat luas serta peran strategis kepada kaum perempuan terutama dalam struktur kepemimpinan di partai politik. Tetapi, banyak juga partai politik yang hanya memberi peran figuran hanya untuk sekedar memenuhi formalitas sesuai ketentuan undang-undang perempuan dan kebijakan afirmasi. Proses perekrutan politik dan kandidasi yang dilakukan dalam Garda Wanita Malahayati di Kabupaten Jepara terbilang cukup mudah. Selain sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh Partai Nasdem dalam rangka pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, baik dalam sistem

kepengurusan partai maupun dalam penetapan daftar calon legislatif, kandidasi yang terjadi di lingkungan Partai Nasdem dirasa cukup mudah dan lebih fleksibel dikarenakan rendahnya minat dari perempuan.

Keberadaan partai politik dalam mengupayakan dan memperjuangkan isu gender dan perempuan di lembaga legislative sangat tidak maksimal dan cenderung lepas tangan. Pada akhirnya partai politik tetap kembali dengan mengedepankan oligarki, patron-klien dan berbagai kepentingan pragmatis lainnya. Kultur politik Indonesia cenderung patronatif sehingga membuat public kesulitan untuk menerima keadaan politisi perempuan yang memenuhi standar berkualitas, integritas dan kapabilitas. Pemahaman gender sebagai sebuah struktur sosial, berada dalam struktur patriarki sehingga membuat lemahnya posisi perempuan dalam kultur politik. Terutama peran perempuan dalam partai politik berfungsi untuk mengagregasi berbagai kepentingan politik perempuan. Berdasarkan hasil survey kontemporer dikatakan bahwa, kehadiran perempuan dalam ranah politik belum dapat membawa perubahan secara signifikan (Hikmawan, 2016).

Keberadaan perempuan yang berpartisipasi dalam gerakan politik belum dapat memberikan makna tersendiri bagi masyarakat. Fenomena ini membuat publik menjadi semakin ragu akan kualitas dan integritas politisi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan melalui konteks politik. Hal ini jelas memberikan dampak negatif terutama bagi politisi perempuan yang ingin mengarungi kontestasi dunia politik. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perekrutan anggota Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara. Batasan penelitian ini seputar dampak diberlakukannya sistem perekrutan terhadap komposisi perempuan di Partai Nasional Demokrat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perekrutan anggota perempuan Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana dampak diberlakukannya sistem perekrutan terhadap komposisi perempuan di Partai Nasional Demokrat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Sistem Perekrutan Anggota Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui dampak diberlakukannya Sistem Perekrutan terhadap Komposisi Perempuan di Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh manfaat, diantaranya:

a. Secara Teoritik

- 1) Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi serta kajian baru dalam program studi Ilmu Politik.
- 2) Menambah kajian pengetahuan tentang peran politik perempuan dalam partai politik.

a. Secara Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi pembaca, peneliti selanjutnya maupun civitas akademika terkait dengan kegiatan kepolitikan.
- 2) Sebagai referensi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk melakukan kajian baru.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian terkait Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik (Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019), peneliti membagi tinjauan pustaka kedalam beberapa bagian diantaranya :

1. Peran Politik Perempuan

Kajian tentang Peran Politik Perempuan antara lain dilakukan oleh Yulita (2008), Sri Sumarni Sjahril (2016), Lusi Renhoat (2019), dan Rahmat Pratama (2020).

Yulita (2008) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran politik perempuan dalam partai kebangkitan bangsa mengutamakan perempuan dalam segala tindakan dan sikap di tingkat nasional. Hal ini telah teruji dengan kenyataan bahwa peran perempuan dalam partai kebangkitan bangsa memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang bersifat inklusif sehingga mengakomodir segala kepentingan perempuan dalam politik. Hal ini ditandai dengan adanya draft aturan terkait gender dalam konstitusi partai tersebut, kemudian PKB menempatkan perempuan dalam jabatan yang penting dan strategis dalam struktur partai maupun di lembaga legislative. Sementara Sri Sumarni Sjahril (2016), melakukan kajian tentang Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik perempuan di partai Nasdem Makassar sangat penting bagi pelebagaan partai terutama dalam memperkenalkan pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih muda. Partai Nasdem Makassar menyediakan ruang bagi perempuan untuk dapat mengisi posisi strategis di politik baik dalam kepengurusan partai maupun di legislative.

Pada penelitian lain, Rahmat Pratama (2020), mengambil fokus penelitian di Partai Nasional Demokrat di Kota Palembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh elit politik

perempuan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem terbagi kedalam partisipasi elit politik perempuan yang menjadi kandidat calon anggota dewan partai Nasdem dan para elit politik perempuan partai Nasdem yang berpartisipasi di internal partai Nasdem. Organisasi sayap perempuan partai Nasdem Garda Wanita Malahayati (Garnita) menjadikan hubungan antara masyarakat semakin erat melalui berbagai kegiatan bakti sosial yang dilakukan sebagai bentuk pengenalan partai Nasdem secara luas kepada masyarakat. Pengenalan tersebut sebagai upaya untuk mendorong kaum perempuan yang memiliki potensi untuk masuk dalam bidang politik, sehingga menjadi motivasi bagi para perempuan lainnya untuk dapat berjuang dan bersaing menjadi politisi demi keseimbangan gender.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lusi Renhoat (2019), menunjukkan adanya peningkatan terhadap kualitas partai dapat dilihat sebagai kewajiban setiap anggota partai terutama dalam perekrutan anggota yang berkualitas. Namun, dalam konteks komunikator politik perempuan tidak terlalu dilibatkan. Terutama dalam struktur organisasi di partai politik maupun menjadi kandidat calon anggota legislatif. Peningkatan ini harus dinilai berdasarkan tingkat efektifitas dan dampak yang ditimbulkan oleh perempuan melalui berbagai perubahan dalam partai politik mulai tata cara peraturan kelembagaan, penegasan norma, praktik dan keharusan, meningkatnya hak dan wewenang bagi sesama perempuan untuk memperjuangkan ketidakadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan taraf hidup perempuan, anak-anak dan lansia di masyarakat.

2. Perempuan

Kajian tentang Perempuan dilakukan oleh Lia Natalia (1990).

Lia Natalia (1990), penelitian ini menjelaskan terkait dengan peran perempuan dalam politik di Kota Makassar, khususnya dalam gerakan politik yang ada dalam PK. Sejahtera. Dalam islam perempuan tidak pernah diberikan batas untuk ikut terjun dalam dunia politik,

namun adanya hambatan yang terjadi dikarenakan faktor budaya dan kemampuan kompetensi dari perempuan yang dianggap belum dapat sepenuhnya mampu untuk masuk ke dalam lingkungan politik. Hal ini membuat perempuan belum dapat berperan semaksimal mungkin dikarenakan konstruk budaya, agama, dan sosial masyarakat yang masih membatasi kebebasan perempuan untuk bergerak lebih maju. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik harus menyadari adanya benturan terhadap kenyataan budaya dan sosial masyarakat. Di Makassar masih didominasi oleh budaya patriarki yang membuat kaum laki-laki juga menguasai dalam persoalan politik. Budaya patriarki selalu menempatkan perempuan dalam posisi satu tingkat dibawah laki-laki. Adanya dominasi patriarki ini membuat kesenjangan dan ketidakadilan gender semakin terlihat antara laki-laki dan perempuan.

3. Partai Politik

Kajian tentang Partai Politik dilakukan oleh (Effendi, 2019), (Yudhistira, 2014), Panca Haqiqi (2014), Hurriyah dan Delia Wildianti (2020).

Winda Roselina Effendi (2019), melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi secara empiris terkait pemahaman tentang hubungan antara organisasi sayap partai perempuan dan partai politik. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi terkait fungsi partai sebagai partai berbasis keadilan gender dengan mengusung tema dan program politik yang mengutamakan perjuangan terhadap anak, perempuan dan lansia baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira (2014), menunjukkan bahwa partai Nasdem merupakan harapan dan semangat dari gagasan politik sebagai idealisme dalam membangun sebuah peradaban baru yaitu restorasi Indonesia. Gagasan ini dinilai sebagai awal permulaan gerakan sosial yang menjadi tanda kembalinya sebuah gagasan politik di Indonesia ditengah padatnya pragmatisme mengenai partai politik. Sehingga dalam

kemunculannya partai Nasdem banyak mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Partai Nasdem merupakan satu-satunya partai politik baru yang lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Panca Haqiqi (2014), menunjukkan bahwa partai Nasdem menggunakan konsolidasi politik dalam melakukan proses pelembagaan partai. Proses tersebut terbagi ke dalam tiga tahapan, diantaranya: Pertama, adanya konsolidasi pelembagaan dalam pembentukan partai, penyusunan kepengurusan dan perekrutan kader. Kedua, konsolidasi pelembagaan tersebut digunakan untuk persiapan pemilu legislatif pada tahun 2014. Ketiga, konsolidasi pelembagaan dilakukan sebagai evaluasi berdasarkan hasil pemilu tahun 2014. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hurriyah dan Delia Wildianti (2020), menganalisis bentuk hubungan organisasional antara organisasi sayap perempuan partai dengan partai politik saat era reformasi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan adanya pola hubungan yang terjadi secara informal dengan menempatkan organisasi sayap perempuan tersebut menjadi organisasi kolateral yang memiliki peran penting dalam proses pendekatan partai politik dengan pemilih perempuan. Hal ini menandakan adanya pola serta hubungan yang bersifat kolateral dan informal yang memungkinkan organisasi sayap perempuan untuk dapat membentuk representasi secara sosial dalam kalangan pemilih perempuan, namun hal tersebut dapat menjadi potensi yang membatasi perempuan dalam upaya mendorong agenda keterwakilan perempuan di partai Politik (Wildianti, 2020).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk menemukan solusi atau memecahkan suatu permasalahan agar mudah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam memecahkan suatu masalah perlu dirumuskan langkah-langkah yang dibentuk secara efektif dan efisien. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan

secara tepat oleh penulis dengan menggunakan metode-metode berikut, diantaranya:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara kepada informan untuk mendapatkan pembuktian kebenaran dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan sebuah gambaran, intepretasi, dan deskripsi data yang ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian, pendekatan tersebut lebih menekankan terhadap proses karena tanggapan partisipan menjadi kunci utama dalam penemuan data penelitian (Raco, 2010).

Penelitian Kualitatif menurut Jhon W. Cresswell (2013), dapat dikatakan sebagai sebuah metode yang memberikan pemahaman dan gambaran terhadap suatu fenomena yang diambil dari masalah sosial maupun masalah kemanusiaan dalam masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman dari sebuah pengalaman yang dialami oleh informan, melalui aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dengan mengubah sebuah informasi menjadi representasi baru yang meliputi wawancara, dokumentasi, rekaman dan catatan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan hasil berupa perilaku sosial masyarakat yang terjadi dalam waktu dan kejadian tertentu. Sehingga peneliti dapat menganalisis suatu kejadian yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat (Afrizal, 2014). Seperti penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terdapat di Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jepara.

Dalam buku yang berjudul “*Qualitative Inquiry And Research Design*” oleh John W. Creswell (1998), menjelaskan tradisi penelitian yang dikategorikan menjadi lima bagian, yakni: biografi, fenomenologi, grounded theory study, studi kasus dan etnografi. Salah satu tradisi yang

sesuai dan digunakan oleh peneliti yakni melalui pendekatan studi kasus. Metode penelitian studi kasus menurut Creswell, dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang menggunakan analisis secara mendalam terhadap sebuah kasus dan peneliti mendapatkan data melalui berbagai cara.

Menurut Creswell studi kasus memiliki tiga karakteristik, diantaranya: Pertama, mengidentifikasi kasus sebagai sebuah studi. Kedua, studi terkait kasus tersebut terikat dalam sistem waktu dan empat tertentu. Ketiga, studi kasus didasarkan oleh berbagai sumber informasi yang valid, serta dalam pengumpulan data menggunakan gambaran secara rinci dan menyeluruh terkait respons dari peristiwa yang sedang diteliti. Keempat, pendekatan terkait studi kasus membuat peneliti harus menghabiskan waktu untuk memberikan gambaran terkait fenomena atau konteks dari sebuah kasus.

b. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan narasumber dan partisipan sebagai sumber informasi dari permasalahan penelitian. Sumber data dipilih berdasarkan latar belakang dan pengalaman informan maupun data yang sesuai dengan objek penelitian. Teknik tersebut mempermudah peneliti untuk memilih informan berdasarkan latar belakang dan pengalaman yang dialami oleh informan (Creswell J. W., 2018). Sumber data dalam mendapatkan informasi di penelitian ini melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung pada tempat penelitian, data ini diperoleh melalui proses observasi terstruktur dan wawancara secara langsung dengan informan. Dalam sumber data primer dilakukan wawancara secara langsung dengan Ketua dan Anggota Garda Wanita Malahayati (Garnita) Kabupaten Jepara, yaitu:

1. H. Pratikno Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jepara.
2. Dra Farah Elfirajun AG selaku Ketua Garda Wanita Malahayati (Garnita) Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jepara.
3. Kader perempuan anggota Garda Wanita Malahayati (Garnita) Partai Nasdem yang memiliki keterkaitan terhadap informasi yang sedang dilakukan oleh peneliti.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti buku, internet, literatur, artikel, jurnal dan sebagainya (Sugiyono, 2009). Sumber data sekunder didapatkan melalui observasi, dokumentasi dan data laporan penelitian terkait Garda Wanita Malahayati (Garnita) Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara.

c. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk mengkaji sebuah studi kasus (Creswell J. W., 2018). Dimana peneliti sedang meneliti tentang Peran Politik Perempuan dalam Partai Politik (Studi Kasus Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019) melalui beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Metode Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh suatu data, selain itu dengan observasi peneliti berada secara langsung bersama partisipan dan ikut serta dalam kegiatan suatu subjek, melalui observasi peneliti akan mendapatkan

informasi yang mungkin tidak akan diungkapkan oleh narasumber melalui proses wawancara (Raco, 2010).

b. Metode Wawancara

Wawancara dapat dikatakan sebagai proses tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada narasumber dengan mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Raco, 2010). Peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dimana peneliti menyediakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sehingga peneliti mengetahui berbagai informasi yang nantinya akan didapatkan saat melakukan wawancara dengan informan (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini mencari informan berdasarkan dengan kriteria keterhubungan terkait Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara. Proses rekrutmen informan dilakukan dengan cara pengamatan terlebih dahulu, kemudian mencari informasi terkait dengan peran Garda Wanita Malahayati (Garnita) dalam mekanisme rekrutmen Partai Nasional Demokrat, selanjutnya mengidentifikasi para anggota kader Garda Wanita Malahayati (Garnita) apakah sesuai dengan kriteria informan atau tidak.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui gambar, cerita, teks, dan rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dokumentasi tersebut digunakan sebagai data penguat dan pendukung dalam proses pengolahan data (Raco, 2010).

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dikatakan sebagai proses dalam mengolah data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan observasi (Raco, 2010). Setelah memperoleh data peneliti mengumpulkan data

tersebut dan dianalisis melalui cara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat dan diolah sesuai standar penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dan analisis data harus menjadi proses berkelanjutan dalam penelitian kualitatif (Creswell J. W., 2018). Penelitian ini menggunakan model analisis data oleh Milles yaitu analisis data secara induktif dari khusus ke umum, data ini nantinya akan diolah secara interaktif dan berkelanjutan sehingga data yang dihasilkan berupa data jenuh atau konsisten (Miles, 1984).

Berdasarkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi analisis yang dapat dilakukan, diantaranya: Pertama, Reduksi data yaitu peneliti melakukan pemilihan, pemilahan, dan pemusatan data untuk menghindari data yang tidak penting sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Kedua, Penyajian data dilakukan oleh peneliti setelah selesai melakukan penyusunan data. Setelah dilakukan pemilihan, pemilahan dan pemusatan data peneliti akan menyusun data-data tersebut dan menyajikan data ke dalam bentuk teks, tabel, grafik, matrik atau bagan.

Sehingga peneliti dan pembaca akan mudah dalam memahami dan menarik kesimpulan dari tulisan tersebut apabila ada ketidaksesuaian data di lapangan maupun teori terkait Rekrutmen Perempuan dalam Garda Wanita Malahayati (Garnita) Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jepara. Ketiga, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data disajikan langkah selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil penelitian kualitatif tersebut, penarikan kesimpulan merupakan hasil temuan yang baru dari penelitian yang dilakukan berdasarkan data di lapangan dan teori konsisten yang kuat dan valid (Rijali, 2018).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran bagi pembaca yang saling berhubungan dengan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Penelitian ini dibagi ke dalam 6 bab, dimana setiap bab berisi beberapa sub bab, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian, dimana terdapat penjelasan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta metode yang digunakan dalam penelitian berupa sistematika penulisan.

BAB II : Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik

Bab ini menyangkut penjabaran mengenai teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Penulis menggunakan teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu teori gender dan teori organisasi kolateral partai.

BAB III : Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara

Bab ini berisi penjelasan secara rinci terkait lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian terdapat di kota Jepara tepatnya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Jepara. Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari sejarah berdirinya partai Nasdem di Kabupaten Jepara sampai struktur pimpinan DPD dan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara.

BAB IV : Sistem perekrutan anggota perempuan Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara.

Bab ini berisi tentang hasil penelitian penulis untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait bagaimana perekrutan anggota perempuan partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara.

BAB V : Dampak diberlakukannya sistem perekrutan terhadap komposisi perempuan di Partai Nasional Demokrat

Bab ini berisi tentang hasil penelitian penulis untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait bagaimana dampak diberlakukannya sistem

perekrutan terhadap komposisi perempuan di partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara.

BAB VI : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, bab ini berisi kesimpulan inti dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang memaparkan hasil dari temuan penelitian untuk dijadikan rujukan penelitian serupa yang bersifat kritik serta konstruktif. Bagian terakhir penulisan berisi daftar pustaka, lampiran dan biodata peneliti.

BAB II

REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK

A. Kerangka Teori

Penelitian terkait Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik (Studi pada Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019), membutuhkan teori yang sesuai dengan penelitian terkait sehingga dapat mempermudah peneliti dalam merumuskan kajian masalah, diantaranya:

1. Penjelasan Konsep

a. Peran Politik Perempuan

Peran merupakan tindakan yang ditampilkan atau dipertontonkan dalam suatu tempat atau masyarakat berdasarkan peran yang dijalankan oleh seseorang melalui jabatan dalam masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan jabatan yang saling berhubungan dalam satu tempat dengan tempat lain. Gross, Mason, dan Mc Eachem dalam Berry (1981), mendeskripsikan peran sebagai harapan yang dilakukan oleh individu dalam menempati kedudukan sosial atau status tertentu. Kemudian Dahrendorf dalam Poloma (1994), menjelaskan bahwa peran dapat dikatakan sebagai konsep untuk memahami manusia secara sosiologis. Dimana setiap individu yang menduduki posisi sosial tertentu harus memerankan perannya sesuai dengan peran yang telah di amanatkan.

Peran perempuan dalam partai politik menurut Cantor Dorothy dan Bernay (1998), menjelaskan bahwa peran perempuan untuk terjun dalam dunia politik jangan hanya dicukupkan dalam bidang birokrasi saja, namun harus ada peningkatan menuju posisi

yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang semakin luas dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dalam partai politik itu sendiri. Peran perempuan dalam dunia politik merupakan suatu persoalan yang mengharuskan perempuan untuk setara dengan kaum laki-laki sehingga persoalan perempuan menjadi aspek utama dalam golongan kelas, usia dan identitas perempuan sebagai posisi pendamping yang sering terhindar dari peran laki-laki dan berpengaruh besar terhadap perkembangan perempuan di dunia politik.

Selain itu, dijelaskan bahwa masa jabatan dan sikap membedakan jenis kelamin merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan yang hendak menduduki jabatan, sehingga peristiwa tersebut harus disikapi dengan hati yang sabar serta lebih rasional dalam memberikan tanggapan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa peluang bagi perempuan akan semakin terbuka bila mereka memiliki pengalaman dalam menduduki sebuah jabatan dan harus melalui proses pemilihan serta memiliki sikap peran gender non tradisional, memiliki dana finansial dengan staf kampanye yang memadai (Bernay, 1998).

Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia banyak menghadapi tantangan dan hambatan terutama dalam pergerakan perempuan sehingga terus mengalami perubahan dan penyesuaian dari masa ke masa. Diharapkan perempuan mampu menanggapi tekanan yang diperlakukan secara diskriminatif maupun ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah partai politik secara rasionalisasi, sehingga tidak menimbulkan konflik internal partai. Kondisi tersebut mengharuskan perempuan memiliki jiwa besar untuk memasuki dunia politik, terutama dalam pengalaman berorganisasi. Saat ini jarang ditemui perempuan yang ingin berpartisipasi dan berperan dalam partai politik, sehingga menjadi

salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi politik yang ingin memperjuangkan dan memberdayakan perempuan di masyarakat.

b. Perempuan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata perempuan dikenal dengan sebutan wanita atau perlawanan dari laki-laki. Dalam konteks psikis atau gender perempuan didefinisikan sebagai sebuah sifat feminim yang melekat pada seseorang. Sedangkan pengertian fisik perempuan digambarkan sebagai salah satu jenis kelamin yang dapat ditandai melalui alat reproduksi seperti rahim, sel telur, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam bahasa Arab perempuan dikatakan sebagai al-Mar'ah yang berarti perempuan yang sudah dewasa atau lawan jenis pria. Istilah wanita berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti “yang diingkankan kaum laki-laki”. Pemaknaan tersebut membuat wanita sebagai manusia yang sabar, pasif, pemelihara, kurang diakui perannya dan tidak diharapkan untuk dapat lebih menonjol dibandingkan laki-laki (Mahmud, 2013).

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001), istilah perempuan lebih bermakna dibandingkan dengan kata wanita karena perempuan dirasa memiliki makna yang lebih bersifat konstruktif. Sedangkan menurut Nugroho (2008), Perempuan didefinisikan sebagai manusia yang secara biologis memiliki alat reproduksi seperti rahim, alat untuk menyusui, sel telur, dan saluran untuk melahirkan yang secara permanen merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah. Secara spesifik perempuan memiliki makna yang berbeda-beda, namun secara substansial hal tersebut mengarah pada sifat, jenis kelamin dan kedudukan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan wanita yang memiliki daya tarik tersendiri baik berasal dari kecantikan, sifat feminisme dan berposisi sebagai

istri atau pasangan laki-laki yang memiliki sifat keibuan yang matang secara emosi maupun tindakan.

c. Partai Politik

Partai politik didefinisikan secara umum sebagai sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan ideologi seseorang yang memiliki visi, misi dan kepentingan dalam bidang politik. Pembentukan partai politik dilakukan untuk mewakili kepentingan masyarakat, sarana komunikasi politik, dan memobilisasi massa. Partai politik menurut Mark N. Hagopian (1996), merupakan organisasi yang dibentuk untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik, dalam kerangka prinsip untuk mencapai suatu kepentingan sebuah ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan atau partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Ramlan Subakti (1992), partai politik dikatakan sebagai perkumpulan orang yang terorganisir dan dipersatukan karena adanya persamaan ideologi dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam kontes pemilihan umum demi melaksanakan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Ideologi partai politik ditujukan sebagai kepentingan elit politik untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik muncul berdasarkan tiga teori besar, yaitu: teori kelembagaan yang memandang partai politik memiliki hubungan dengan parlemen sehingga timbul partai politik, teori situasi historik memandang partai politik sebagai upaya dalam mengatasi krisis yang dilakukan oleh suatu sistem politik untuk membawa perubahan di masyarakat dan teori pembangunan memandang partai politik sebagai sebuah proses pembaharuan dalam sistem sosial ekonomi.

Partai politik merupakan organisasi dengan aktivitas politik yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan menarik dukungan

masyarakat melalui persaingan antara golongan satu dengan golongan lain yang memiliki pandangan serta pendapat berbeda. Pembentukan organisasi partai politik merupakan wadah yang menyatukan individu dengan ideologi serupa sehingga dapat diorientasikan dan dikonsolidasikan secara bersama. Sehingga mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan (Budiardjo, 2007). Peran dan fungsi partai menurut Kristina Weissenbach (2010), dikategorikan ke dalam tiga fungsi yang berbeda, diantaranya: fungsi partai politik dalam pemilihan umum, fungsi partai politik dalam organisasi dan fungsi partai politik dalam pemerintahan.

d. Politik Menurut Islam

Politik menurut islam berkaitan dengan pencerminan terkait ajaran Islam dalam politik, melalui hubungan antara manusia dengan kekuasaan yang dipahami sebagai petunjuk tuhan yang menyatu dan bercampur dengan kepentingan manusia. Islam politik adalah bentuk perjuangan Islam di bidang politik yang memiliki sudut pandang bersifat ideologis melalui pemikiran manusia yang lebih banyak dipengaruhi sifat simbolik-ideologis Islam secara garis besar panduan politik. Melalui struktur politik partai politik Islam, perjuangan Islam dianggap sebagai sebuah kesadaran dalam mencapai tujuan politik. Oleh karena itu, demi kepentingan partai politik mayoritas kelompok muslim menghabiskan tenaga mereka untuk melanjutkan partai yang sudah ada atau menghidupkan kembali larangan atau melahirkan partai yang baru (Karim, 1991).

Menurut Mark Juergensmeyer (2003), perjuangan aspirasi Islam politik ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam. Menurutnya kehadiran gerakan-gerakan Islam di berbagai belahan dunia yang ditempati oleh masyarakat muslim telah menimbulkan suatu dorongan kuat untuk menentang negara

sekuler. Namun, tanpa dipungkiri kegagalan atau keberhasilan gerakan tersebut, melahirkan fenomena gerakan Islam yang memberikan pertentangan kepada bentuk negara sekuler dan membawa implikasi penguatan pengaruh agama Islam dalam kehidupan politik.

Gagasan mengenai nasionalisme-sekuler perlu mendapatkan legitimasi simbol yang datang dari agama untuk dapat berkembang di negara yang mayoritas dihuni oleh penduduk umat Islam. Tanpa legitimasi agama maka proses demokratisasi tidak dapat berjalan di berbagai belahan dunia, sehingga unsur-unsur esensial demokrasi perlu dibawa melalui negara religius baru sebagai sintesis antara agama dan negara sekuler (Juergensmeyer, 2003).

2. Teori Gender Mansour Fakih

a. Konsep Teori Gender Mansour Fakih

Gender merupakan konstruksi sosial yang membuat laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam kehidupan sosial, perempuan tidak hanya menjadi makhluk subordinat laki-laki yang peran sosialnya tidak dapat berkembang secara luas. Gender adalah konsep yang dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif non biologis. Gender sendiri lebih mengarah pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan non biologis lainnya. Isu gender muncul karena adanya kesadaran kaum perempuan akan keterbelakangan yang dialami oleh kaumnya.

Berdasarkan pengamatan masih banyak terjadi kesalahpahaman dengan konsep gender dan usaha emansipasi kaum perempuan. Dalam memahami konsep gender perlu diperhatikan perbedaan terkait kata gender dengan kata seks atau jenis kelamin.

Kepentingan tersebut menghadirkan persoalan-persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan berkaitan erat dengan perbedaan gender (*gender differentces*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Melalui pemahaman terkait pembedaan yang jelas terkait konsep seks dan gender sangat penting dalam membahas ketidakadilan sosial (Fakih, 2008).

Seks atau jenis kelamin merupakan pembagian kelamin manusia yang ditentukan kedalam dua jenis secara biologis. Dimana secara ketentuan biologis tidak dapat berubah atau dikatakan sebagai ketentuan tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sehingga, mengakibatkan perbedaan fungsi dan peran sosial dalam masyarakat. Ciri dari sifat yang melekat tersebut dapat saling dipertukarkan (Fakih, 1996).

Masyarakat memahami konsep ini tidak sesuai pada tempatnya, dimana gender sebagai dasar konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat atau ketentuan biologis dari tuhan. Sebaliknya anggapan terkait kodrat wanita merupakan konstruksi sosial dan kultural atau gender. Jenis pekerjaan menjadi urusan yang dapat dipertukarkan dan tidak bersifat universal sebagai bentuk kodrat wanita atau takdir tuhan atas wanita. Dalam fenomena mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga bukanlah kodrat wanita karena sesungguhnya hal tersebut merupakan gender.

b. Asumsi Dasar Teori Gender Mansour Fakih

Analisis gender terkait permasalahan yang menimpa kaum perempuan sering mengalami perlawanan (*resistance*). Penolakan terhadap analisis gender tersebut dilakukan oleh kelompok yang

mengkritik sistem sosial dominan seperti kapitalisme. Penyebab munculnya perlawanan tersebut perlu dianalisis kembali. Pertama, status perempuan dipertanyakan karena pada dasarnya perempuan mengubah struktur dan sistem tertua masyarakat dalam status quo ketidakadilan. Kedua, terjadi kesalahpahaman terkait kaum perempuan yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga pemahaman terkait konsep gender menjadi isu mendasar dalam menjelaskan permasalahan kemanusiaan dan masalah hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Perbedaan gender (*gender differences*) dalam proses selanjutnya menghadirkan peran gender (*gender role*) yang dianggap tidak memunculkan masalah sehingga tidak pernah digugat. Perbedaan gender bukanlah suatu permasalahan kecuali perbedaan tersebut menghadirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Sehingga, permasalahan yang perlu digugat oleh analisis gender adalah mereka yang memakai struktur ketidakadilan yang muncul akibat peran dan perbedaan gender. Ketidakadilan gender atau bias gender adalah sebuah sistem yang terstruktur dimana membuat kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban.

Bias gender, bias gender terbentuk karena adanya marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda. Ketidakadilan gender saling mempengaruhi dan terikat satu sama lain. Manifestasi ketidakadilan tersebut tersosialisasi secara mantap kepada kaum laki-laki dan perempuan, dengan seiring berjalannya tahun akhirnya mereka terbiasa dan seolah-olah mempercayai bahwa peran gender merupakan kodrat. Sehingga tercipta suatu sistem dan struktur keadilan yang diterima oleh masyarakat (Fakih, 2008).

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi, marginalisasi ekonomi, kekerasan, stereotype, dan beban kerja terbagi dalam berbagai tingkatan, diantaranya :

1. Manifestasi ketidakadilan gender terjadi di berbagai negara. Masih banyak peraturan dan kebijakan yang membawa manifestasi ketidakadilan gender contohnya kebijakan PBB dan pendekatan pembangunan.
2. Manifestasi ketidakadilan gender terjadi di tempat kerja. Aturan kerja, keorganisasian dan sistem manajemen kerja masih banyak menerapkan ketidakadilan gender.
3. Manifestasi ketidakadilan gender dalam adat istiadat. Kelompok etnik dalam kultur suku masih mencerminkan manifestasi ketidakadilan gender dalam mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat.
4. Manifestasi ketidakadilan gender terjadi di lingkungan rumah. Proses pengambilan keputusan dan pembagian kerja dalam rumah tangga dilakukan dengan asumsi bias gender dan secara tidak langsung telah mencerminkan ketidakadilan gender.
5. Manifestasi ketidakadilan gender dalam keyakinan dan ideologi. Sehingga manifestasi ketidakadilan gender telah menyerap dalam keyakinan masyarakat baik dalam tingkat negara sampai bersifat universal.

Menurut Mansour Fakih (2008), Ketidakadilan gender dapat dihentikan melalui upaya yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan strategi pemecahan jangka pendek, keterlibatan perempuan dapat disertakan dalam program aksi sebagai upaya yang dilakukan agar perempuan dapat membatasi permasalahannya sendiri. Contoh, perlunya keterlibatan perempuan dalam menjalankan kekuasaan di sektor publik dan program pengembangan masyarakat, sehingga diharapkan perempuan

mampu mengatasi masalah marginalisasi. Namun, dalam subordinasi perempuan jangka pendek diperlukan upaya pelaksanaan pendidikan dan mengaktifkan kembali organisasi dan kelompok perempuan. Dalam menghentikan permasalahan terhadap perempuan, perempuan harus berani memberikan pesan penolakan secara tegas kepada pelaku pelecehan.

Sedangkan strategi pemecahan jangka panjang diperlukan untuk memperkuat usaha tersebut. Perjuangan strategis ini dilakukan melalui perdebatan ideologi di masyarakat, sehingga upaya strategis tersebut perlu mendapatkan pendukung dalam melakukan studi terkait bentuk ketidakadilan gender dan manifestasinya di masyarakat, negara dan rumah tangga. Contoh perdebatan ideologi tersebut terjadi dalam upaya untuk memperlancar kampanye terkait kesadaran kritis dan pendidikan masyarakat dalam menghentikan bentuk ketidakadilan gender. Strategi praktis ini selanjutnya dapat digunakan sebagai rujukan advokasi dalam mencapai kebijakan, aturan dan hukum pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap perempuan (Mansour Faqih, 2010).

c. Istilah Kunci Dalam Teori Gender Mansour Fakih

Dalam analisis gender Mansour Fakih (2008), ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan, yaitu :

a. Gender dan Marginalisasi (pemiskinan ekonomi)

Gender dan Marginalisasi kepada kaum perempuan. Marginalisasi perempuan belum tentu disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun permasalahan dalam analisis gender muncul karena marginalisasi yang ditimbulkan karena perbedaan gender. Misalnya, marginalisasi terhadap perempuan dalam rumah tangga dilakukan melalui bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan.

b. Gender dan subordinasi

Perempuan dianggap emosional sehingga tidak dapat memimpin, sehingga mengakibatkan perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Misalnya, subordinasi dalam rumah tangga dan masyarakat membuat kaum perempuan tidak penting dalam membuat kebijakan. Praktik tersebut terjadi karena kesadaran gender yang mengalami ketidakadilan.

c. Gender dan Stereotype (pelabelan negatif)

Pelabelan buruk kepada jenis kelamin tertentu mengakibatkan diskriminasi sebagai ketidakadilan yang ditimbulkan akibat stereotype. Masyarakat memberikan pelabelan negative kepada perempuan yang membuat kaum perempuan dibatasi, disulitkan, dimiskinkan, dan dirugikan. Misalnya, asumsi masyarakat bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, sehingga setiap kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini dan bahkan menyalahkan korban.

d. Gender dan Violence (Kekerasan)

Kekerasan kepada perempuan disebabkan oleh bias gender (*gender-related violence*) karena anggapan perbedaan gender. Kekerasan gender diakibatkan karena ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Kekerasan ini mencakup bentuk pemerkosaan, tindakan pemukulan (*domestic violence*), sampai penyiksaan (*genital mutilation*), kekerasan pelacuran (*prostitution*), kekerasan pornografi, kekerasan pemaksaan sterilisasi (*forced sterilization*), kekerasan terselubung (*molestation*) dan kasus pelecehan (*sexual and emotional harassment*).

e. **Gender dan Beban Kerja**

Beban kerja yang diakibatkan oleh bias gender diperkuat oleh adanya pandangan atau keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa jenis pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan jenis pekerjaan laki-laki dan dikategorikan bukan produktif sehingga tidak dapat masuk kedalam statistik ekonomi negara. Sejak dini anggapan gender bagi kaum perempuan telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender. Sehingga pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab bagi perempuan, terlebih jika perempuan masih harus bekerja maka dia menanggung beban kerja ganda.

3. Teori Organisasi Kolateral Partai Thomas Poguntke

a. Konsep Teori Organisasi Kolateral Partai Thomas Poguntke

Analisis terhadap pola hubungan antara partai politik dengan organisasi kolateral partai merupakan salah satu kunci dalam memahami keberlangsungan partai, stabilitas organisasi dan keberhasilan electoral. Partai politik menggunakan organisasi kolateral partai untuk membentuk dan menciptakan hubungan antara kelompok pemilih potensial (Poguntke, 2005).

Organisasi kolateral partai bertujuan untuk mengartikulasi dan mengumpulkan kepentingan partai politik sebagai perantara penting antara partai politik dengan masyarakat. Hubungan ini menjadi wadah pertukaran suara dengan kebijakan yang dijanjikan oleh partai politik. Pertukaran tersebut didasarkan oleh negosiasi yang dilakukan elit partai politik melalui konsesi kebijakan untuk mendapat mobilisasi dukungan organisasi.

Berdasarkan perspektif partai politik, organisasi kolateral partai berfungsi untuk menjangkau kepentingan kelompok masyarakat tertentu yang mungkin tidak dapat diakses secara

langsung oleh partai politik. Sehingga, sangat memungkinkan masyarakat lebih tertarik untuk bergabung dengan organisasi kolateral partai dengan minat yang lebih relevan dibandingkan partai politik. Partai politik menciptakan hubungan dengan organisasi kolateral partai untuk memperluas jangkauan partai politik dalam masyarakat diluar konstituen inti, sehingga dapat menstabilkan dukungan massa pemilih.

Tabel 1 Jenis Organisasi Kolateral Partai

Jenis Keanggotaan Partai Politik	Organisasi Kolateral Mandiri	Organisasi Kolateral Korporat	Organisasi Afiliasi	Organisasi Pendukung
Jenis Keanggotaan Partai	Keanggotaan secara individu (opsional)	Keanggotaan kolektif (opsional individu)	Keanggotaan individu	Keanggotaan individu
Keanggotaan ganda	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Total
Hak keanggotaan	Individu	Kolektif (individu)	Individu	Individu
Jenis organisasi	Informal	formal	formal	formal
Kontrol Partai	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
Pengaruh Organisasi Kolateral	Variable	Sangat tinggi	Variable	Variable

Sumber: (Poguntke T. , 2000)

1. Jenis Organisasi Kolateral Partai

1. Organisasi Kolateral Mandiri

Sebagai organisasi yang paling mandiri, organisasi kolateral partai tidak memiliki hubungan secara formal dengan partai politik. Hubungan antara partai politik dengan organisasi kolateral partai sangat bervariasi dan sangat mandiri, sehingga proses integrasi terhadap organisasi sangat ketat. Secara

eksklusif hubungan organisasi kolateral partai dengan partai politik tertentu memiliki pengertian terkait persamaan kepentingan. Meskipun tidak ada jaminan akses bagi organisasi kolateral partai terhadap pembuat keputusan partai, menjadikan hubungan tersebut sebagai model interaksi organisasi yang memiliki otonomi maksimal.

2. Organisasi Kolateral Korporat

Organisasi kolateral partai yang terikat dengan partai politik melalui keanggotaan korporat merupakan jenis organisasi kolateral partai yang memiliki potensi paling kuat, karena melibatkan keanggotaan secara kolektif. Keanggotaan organisasi dalam sebuah partai dapat mengarah pada kontrol yang lebih luas terhadap partai politik karena mendapat dukungan oleh elit organisasi.

3. Organisasi Afiliasi dan Organisasi Pendukung

Organisasi afiliasi dan pendukung merupakan jenis klasik dari suborganisasi yang dibuat oleh partai politik. Organisasi kolateral partai tersebut berfungsi untuk mewakili strategi organisasi elit politik yang berusaha untuk mendiversifikasi daya tarik masyarakat. Partai politik menciptakan suborganisasi kelompok secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok sosial ekonomi tertentu seperti pemuda, perempuan, agama, atau etnis minoritas. Secara teknis organisasi afiliasi adalah organisasi independen yang terikat dengan partai politik pada tingkat elit melalui struktur kepengurusan dari sistem kepemimpinan organisasi afiliasi dalam badan eksekutif partai.

Selain itu, keanggotaan ganda merupakan jenis yang menunjukkan bahwa organisasi pendukung memiliki

kemampuan untuk menjangkau masyarakat diluar konstituen internal partai politik. Organisasi ini memiliki tingkat otonomi yang bervariasi tetapi jaminan melalui struktur organisasi independen dalam organisasi afiliasi masih sangat minim. Sebaliknya, organisasi pendukung terintegrasi secara penuh dalam struktur partai utama dan tidak memiliki keanggotaan independen. Oleh karena itu, organisasi ini sangat tidak cocok untuk memperluas daya tarik partai. Namun, dalam pelaksanaannya organisasi ini tetap harus dikenakan peraturan partai yang sangat ketat.

2. Bentuk Hubungan Organisasi Kolateral Partai

Bentuk hubungan antara partai politik dengan organisasi kolateral partai bersifat formal dan informal. Berdasarkan pembahasan terkait jenis organisasi kolateral partai menunjukkan bahwa tidak diperlukan ikatan organisasi secara formal dengan partai politik. Selama hubungan secara kolektif tetap terjaga dan kesamaan pemahaman terkait ideologi partai politik, hubungan negosiasi yang kurang antara partai politik dengan organisasi kolateral partai dapat dipertahankan secara permanen dan memungkinkan terjadi pertukaran kebijakan. Mekanisme utama disini adalah reaksi terhadap tekanan, dimana elit partai harus menyakini bahwa organisasi kolateral partai memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan electoral.

Adanya ikatan formal antar organisasi melibatkan reaksi terhadap tekanan yang didasarkan pada penetrasi organisasi yakni akses elit organisasi ke badan pembuat keputusan partai. Hubungan informal antara partai politik dengan organisasi sayap partai didasarkan terhadap reaksi yang diakibatkan oleh tekanan dalam proses negosiasi secara semi permanen oleh elit organisasi. Elit organisasi tidak dapat memberikan jaminan berupa akses kepada

pembuat keputusan partai. Namun, organisasi sayap partai tetap dapat memobilisasi pemilih untuk memberikan suara atau sebaliknya terhadap partai politik berdasarkan terpenuhinya tuntutan kebijakan yang diajukan oleh organisasi sayap partai.

Dalam beberapa kasus terdapat perwakilan proposional dari keanggotaan organisasi dari badan pembuat aturan partai. Sehingga membuat hubungan pertukaran dapat lebih mudah untuk menerima hasil dari informasi dan tahan lama karena adanya batasan yang tinggi terhadap penghentian koneksi. Hal tersebut tidak hanya membutuhkan perubahan peraturan formal yang melibatkan rintangan khusus seperti mayoritas yang memenuhi syarat tetapi juga akan mewakili berbagai pernyataan politik mengenai hubungan yang semakin dipertanyakan.

Ikatan formal yang terjadi antara organisasi biasanya akan bertahan lama dalam fase hubungan yang tegang. Hubungan berdasarkan ikatan organisasi formal akan bertahan lebih lama, stabil dan efektif dibandingkan hubungan yang terjadi melalui ikatan informal. Hubungan ini yang membuat organisasi kolateral partai sangat berharga bagi elit politik partai. Namun, kerugian tetap dapat terjadi apabila terdapat ikatan antara organisasi yang kuat dengan organisasi kolateral partai yang sama kuatnya, karena dapat membatasi kebebasan elit partai untuk bergerak.

Partai politik memiliki tujuh bentuk model hubungan dengan organisasi kolateral partai, diantaranya: pertama, hubungan partisipatoris (*participatory linkage*), partai menjadi agensi bagi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam politik; kedua, hubungan elektoral (*electoral linkage*), kemampuan pemimpin partai dalam mengontrol berbagai elemen dari proses elektoral; ketiga, kebijakan hubungan responsif (*policy responsive linkage*), partai menjadi agensi yang menyakinkan masyarakat bahwa

pemerintahannya responsif kepada pemilih; keempat, hubungan klientistik (*clientelistic linkage*), partai menjadi saluran penghubung dalam proses pertukaran suara yang dilakukan oleh pemilih; kelima, hubungan langsung (*directive linkage*), para elit politik partai mencoba menggunakan bentuk hubungan ini untuk mengontrol perilaku masyarakat; keenam, hubungan organisasional (*organisational linkage*), bentuk hubungan berdasarkan pertukaran antara elit partai dengan elit organisasi sehingga mampu memobilisasi dan menarik dukungan organisasinya kepada partai politik; dan ketujuh hubungan representatif (*representative linkage*), partai berfungsi untuk mengadakan artikulasi dan mengagregasi kepentingan rakyat (Poguntke T. , 2002).

b. Asumsi Dasar Teori Organisasi Kolateral Partai Thomas Poguntke

Mengingat keuntungan dari ikatan organisasional yang permanen, partai politik yang bergantung pada dukungan dari sektor gerakan sosial yang baru berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara struktural. Gerakan sosial baru dicirikan oleh kurangnya organisasi formal, yang membuat ikatan formal dengan organisasi partai menjadi sangat kuat dan sulit dipecah. Faktanya, posisi tinggi mereka dalam gerakan sebagian besar bertumpu pada anggapan eksternal (media massa atau aktor politik lainnya), sementara legitimasi mereka melalui gerakan itu sendiri tetap lemah.

Gerakan sosial baru adalah agregator kepentingan yang lemah dan cenderung mengintegrasikan serta memobilisasi dukungan dengan mengiklankan solusi secara maksimal. Gerakan sosial baru cenderung merasa sulit untuk menerima bahwa tujuan utama mereka hanya satu di antara beberapa tujuan politik penting yang ingin dikejar oleh partai Hijau. Sehingga terjadi friksi dalam mendukung gerakan Partai Hijau menjadi kurang bisa diandalkan. Akibatnya, partai Hijau dan gerakan sosial baru mulai berpisah, sehingga partai Hijau mulai memikul

tanggung jawab eksekutif, pertama di tingkat lokal dan regional dan akhirnya di pemerintahan nasional (Poguntke T. , 2002).

Sebagian besar karena ini, tetapi juga karena mereka telah berhasil membangun diri mereka sendiri sebagai aktor politik yang kredibel di banyak negara. Gerakan sosial baru tidak memiliki tingkat formalisasi internal yang merupakan prasyarat penting dalam pemilihan elit, karena organisasi gerakan individu cenderung menjaga otonomi mereka. Tidak adanya elit gerakan dengan keputusan yang dapat diandalkan membuat gerakan sosial baru tidak dapat menjadi kandidat untuk ikatan organisasi formal. Sementara partai politik berharap untuk menjalin hubungan informal dengan gerakan sosial baru, bahkan hal itu memiliki nilai terbatas bagi elit partai yang ingin menstabilkan pemilih mereka. Hal ini dikarenakan gerakan sosial baru merupakan agregator kepentingan yang lemah sehingga membatasi efek keterkaitan.

Oleh karena itu, partai politik yang bergantung pada keterkaitan melalui gerakan sosial baru harus hidup dengan landasan sosial yang lemah secara struktural karena memberi mereka stabilitas elektoral yang relatif kecil. Sementara hubungan baik dengan gerakan sosial baru mungkin merupakan aset elektoral yang signifikan. Namun, ada unsur yang sangat formal dan profesional dalam gerakan sosial baru yang akan memenuhi semua persyaratan organisasi untuk menjadi mitra yang stabil dan dapat diandalkan bagi elit partai. Organisasi seperti Greenpeace, Amnesty International dan organisasi non-pemerintah lainnya dapat secara permanen berhubungan dengan organisasi politik. Namun, organisasi gerakan ini secara khusus peduli dengan menjaga citra non-partisan mereka, yang juga merupakan prasyarat bagi kapasitas penggalangan dana mereka secara substansial (Dalton, 1994).

c. Istilah Kunci Dalam Teori Kolateral Partai Thomas Poguntke

1. Partai dan Organisasi Kolateral

Mengingat masalah pengumpulan data yang jelas, tidak mengherankan bahwa data komparatif sistematis tentang pengembangan hubungan informal antara partai politik dan organisasi kepentingan tidak ada. Tesis menyeluruh Kirchheimer, telah menunjukkan bahwa hubungan antara partai dan organisasi kolateral independen menjadi lebih renggang. Untuk tingkat yang lebih rendah, itu juga mengambil bentuk representasi proporsional dari organisasi kolateral keanggotaan di badan pembuat aturan utama partai, biasanya kongres partai (Poguntke, 2005).

Jumlah organisasi kolateral yang sangat sedikit dengan misi denominasi khusus menunjukkan bahwa beberapa kepentingan pembentuk perpecahan yang paling kuat lebih memilih hubungan jarak jauh yang independen dengan partai politik. Namun, temuan yang paling mencolok adalah bahwa seluruh sektor gerakan sosial baru dalam semua inkarnasinya yang bervariasi tidak terhubung sama sekali secara formal dengan sistem partai politik.

Sistem partai pada akhir 1980-an, masih kekurangan keterhubungan organisasi dengan unsur-unsur penting dari konstituensi inti. Yang pasti, hal ini dapat dijelaskan sebagian besar oleh sifat organisasi khusus dari gerakan sosial baru dan disposisi perilaku aktivis mereka, yang cenderung skeptis terhadap politik partai. Selain itu, ini juga merupakan cerminan dari filosofi organisasi partai Politik Baru, yang menganggap diri mereka sebagai sekutu alami partai politik dari gerakan sehingga cenderung dianggap berlebihan untuk membentuk organisasi

pendukung atau afiliasi untuk terhubung ke partai politik baru (Poguntke T. , 1992).

Kegagalan gerakan sosial baru menciptakan pinggiran organisasinya sendiri yang secara elektoral terpapar pada siklus mobilisasi sektor gerakan sosial yang baru. Meskipun tidak sepenuhnya mengejutkan bahwa pendatang baru ini tidak dapat terhubung dengan kepentingan-kepentingan utama pembentuk perpecahan karena mereka muncul lama setelah mobilisasi penuh pasar electoral, mereka juga menginvestasikan sedikit energi dalam menciptakan beberapa organisasi kolateral standar seperti organisasi pemuda atau perempuan.

Secara umum temuan tersebut menunjukkan bahwa partai baru, yang cukup independen dari orientasi ideologis mereka, cenderung mengikuti strategi organisasi yang membedakan mereka dari partai-partai tradisional, mereka lebih berkonsentrasi pada inti organisasi politik partai dan berinvestasi sedikit energi dalam menciptakan organisasi pinggiran yang khas dari partai-partai yang hidup pada masa kejayaan partai massa (Poguntke, 2005).

2. Partai dan Gerakan Sosial Baru

Munculnya keluarga baru partai Politik Baru (sekarang terutama disebut sebagai Partai Hijau) terkait erat dengan tingkat mobilisasi protes yang sangat tinggi di sebagian besar negara demokrasi Barat. Ditopang oleh pergeseran mendasar menuju nilai-nilai postmaterialis dan didorong oleh perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai agenda politik lama pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militer, sebuah aliansi berbagai gerakan berbagi visi yang luas dan agak tidak spesifik dimobilisasi melawan pertumbuhan pembangkit tenaga nuklir dan kemudian berkembang menjadi gerakan ekologi.

Pada umumnya, partai politik mengalami kesulitan untuk menangani isu-isu yang diangkat oleh gerakan, sehingga menyebabkan tumbuhnya kesiapan di antara banyak aktivis gerakan untuk terlibat dalam politik partai itu sendiri. Dengan kata lain, ketidakmampuan struktural partai politik untuk mendamaikan tujuan politik tradisional mereka dengan agenda baru mengakibatkan munculnya keluarga partai baru, dan gerakan sosial baru menjadi kekuatan pendorong. Melihat lebih dekat pada generasi pertama elit partai Hijau menunjukkan bahwa mereka hampir selalu mendapatkan pengalaman politik awal mereka sebagai aktivis dalam gerakan sosial baru. Sejak partai Hijau tumbuh dari gerakan, program awal partai mereka tidak lebih dari cerminan perhatian utama dari berbagai gerakan sosial baru.

3. Organisasi Kolateral dan Perubahan Sosial

Banyak partai besar mulai menjangkau konstituen inti mereka dan menjalin kontak dengan organisasi kepentingan yang relevan. Inti dari strategi ini, yaitu upaya untuk keluar dari subkultur sosial dan menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin kepentingan sosial yang relevan secara non-eksklusif. Analisis secara rinci dengan menggunakan kekuatan hubungan organisasional memunculkan hasil yang serupa, sementara ada sedikit penurunan dalam hubungan melalui organisasi kolateral yang menghubungkan pihak-pihak dengan kepentingan eksternal, hubungan melalui organisasi kolateral secara internal telah mengimbangi hal ini.

Data menunjukkan sedikit perbedaan, antara partai yang bermula dari kader dan partai massa, yang merupakan indikasi kuat dari tekanan adaptif yang ditimbulkan oleh model partai massa. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai baru hampir tidak memiliki hubungan organisasi formal, yang membuat partai-partai

ini lebih rentan terhadap fluktuasi pemilu. Analisis empiris menunjukkan bahwa partai-partai dengan hubungan organisasi yang kuat dengan masyarakat memiliki pemilih yang lebih stabil. Hal ini juga berlaku untuk keterkaitan melalui organisasi keanggotaan partai itu sendiri. Keanggotaan besar secara positif diasosiasikan dengan hasil elektoral yang stabil dan keanggotaan yang berkembang cenderung sejalan dengan perolehan elektoral (Poguntke, 2005).

Adanya ikatan yang kuat dengan organisasi pendukung membatasi kebebasan para elit partai untuk bermanuver, hal ini umumnya berlaku untuk semua jenis organisasi kolateral. Bahkan organisasi pendukung, yaitu organisasi yang terintegrasi penuh dalam struktur partai utama, menjadi arena organisasi bagi perbedaan pandangan dan potensi basis kekuatan bagi elit kontra yang memberontak. Struktur organisasi yang lebih terdiferensiasi dan lebih banyak representasi organisasi pendukung atau afiliasi dalam badan pembuat keputusan utama partai akan meningkatkan kemungkinan langkah program atau strategis diberikan batasan oleh aliansi partai. Pada dasarnya, elit partai dari partai baru pada umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih strategis daripada rekan-rekan mereka di partai tradisional ketika datang untuk merreposisi partai mereka.

Selain itu, kerugian elektoral mereka menurun karena kekuatan substantif dari hubungan organisasi menurun secara menyeluruh. Jelas, stabilitas ikatan formal yang sangat besar antara organisasi partai dan berbagai jenis organisasi kolateral mencerminkan relevansi berkelanjutan dari hubungan semacam itu bagi partai tradisional dan organisasi ini semakin sulit untuk mempertahankan daya tarik mereka. Semakin sedikit orang yang memiliki keinginan untuk bergabung, bahkan mereka yang masih

tergabung dalam kelompok ini mungkin memiliki pandangan yang jauh lebih independen karena munculnya media massa dan informasi yang tidak dikendalikan oleh elit sosial.

Sementara organisasi ini merupakan penggerak dan agregator yang penting, sehingga peran mereka secara keseluruhan jelas sangat menurun. Banyak yang mengalami penurunan keanggotaan, sementara yang lain menjadi lebih pluralistik secara internal. Namun, organisasi ini tetap menjadi sekutu penting bagi elit partai, yang menjelaskan bahwa hubungan yang dimediasi secara organisasional tetap sangat stabil. Selama manfaat timbal balik lebih besar daripada masalah yang disebabkan oleh meningkatnya heterogenitas, elit partai dan organisasi tidak memiliki alasan untuk mengakhiri hubungan eksklusif.

Secara keseluruhan, organisasi dari sistem partai Eropa Barat jelas mengalami penurunan selama beberapa dekade terakhir. Pertama, meningkatnya porsi suara dari partai baru tanpa hubungan yang signifikan dengan organisasi pendukung berarti bahwa jangkar agregat sistem partai telah berkurang. Kedua, partai tradisional telah berhasil mempertahankan sebagian besar ikatan mereka dengan berbagai jenis organisasi kolateral tetapi kapasitas mereka untuk memberikan suara dan mengagregasi kepentingan telah menurun karena proses diferensiasi sosial. Hasilnya adalah sistem interaksi yang semakin pluralistik antara kepentingan terorganisir dan politik partai, ini merupakan sebuah sistem yang semakin menyerupai pola di Amerika Serikat.

BAB III

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI KABUPATEN JEPARA

A. Sejarah Partai Nasional Demokrat

Dalam sejarah politik di Indonesia Partai Nasional Demokrat merupakan pelopor sebuah gerakan perubahan yang menarik seluruh warga negara Indonesia dari berbagai golongan dan struktur untuk ikut serta melakukan perubahan merestorasi Indonesia. Partai Nasional Demokrat di deklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011 dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Juli Tahun 2011. Pada tanggal 11 November 2011 Partai Nasdem resmi ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum dan ditetapkan sebagai tanggal pendirian Partai Nasdem.

Partai ini dipimpin oleh Drs. Surya Dharma Paloh dengan visi dan misi utama yaitu Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Gerakan ini merupakan perwujudan nasionalisme kebangsaan dan kedaulatan nasional demi kesejahteraan masyarakat yang dilandaskan berdasarkan asas politik solidaritas, ekonomi emansipasif, partisipasif dan budaya gotong-royong. Partai Nasdem lahir berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa dan merupakan jawaban atas kekosongan politik gagasan pasca reformasi.

Partai Nasdem hadir untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia dan membawa semangat serta harapan kepada masyarakat bahwa perubahan akan terus terjadi. Partai Nasdem mengusulkan mandat konstitusi dalam membangun dan mengembangkan negara berdasarkan asas kesejahteraan dan prinsip negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi ekonomi, dan mengakui keberagaman berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hingga saat ini Partai Nasdem memiliki beberapa organisasi sayap partai, yaitu Garda Wanita (Garnita Malahayati), Garda Pemuda, Garda Advokasi (Badan Advokasi Hukum), Gerakan Massa Buruh, Petani Nasdem, Nelayan Nasdem, dan Liga Mahasiswa.

Gambar 1 Lambang Gambar Partai Nasdem dan Garda Wanita Malahayati



1. Partai Nasdem dilambangkan dalam lingkaran yang didominasi oleh warna biru dan ditengahnya terdapat siluet berwarna kuning kunyit.
2. Lambang Partai Nasdem merupakan Tanda Gambar Partai Nasdem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
3. Mengenai penggunaan lambang dan/atau tanda gambar Partai Nasdem dan Organisasi Sayap Partai Garda Wanita Malahayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditentukan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Lambang Partai Nasdem bermakna sebagai berikut:

1. Lingkaran biru memiliki makna kemerdekaan dalam berfikir, adanya gagasan-gagasan baru, kecepatan dalam mengambil keputusan, ketepatan dalam bertindak, keberanian, kewaspadaan, serta kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang.
2. Dua siluet kuning kunyit memiliki makna gotong royong, harmonisasi dalam modernitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi kesetaraan sosial, mengedepankan percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada waktu bersamaan. Kuning kunyit merupakan warna yang memiliki arti kemakmuran, seperti warna padi yang siap untuk panen, serta melambangkan sebuah pemikiran yang selalu segar dan siap untuk diimplementasikan.

1. Visi dan Misi Partai Nasdem

- a. Visi Partai Nasional Demokrat adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.
- b. Misi Partai Nasional Demokrat
 1. Membangun politik demokratis berkeadilan, berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Membangun sistem dan model pendidikan kewarganegaraan agar dapat memperkuat karakter bangsa, serta menerapkan perubahan agar terjadi efisiensi sistem dalam pemilihan umum. Meneguhkan gerakan reformasi birkorasi untuk menciptakan sistem yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan reformasi hukum melalui Undang-undang dasar 1945 sebagai gagasan kontrak politik kebangsaan.
 2. Menciptakan demokrasi ekonomi dengan terciptanya partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk didalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita ini diperlukan dukungan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, adanya sistem jaminan secara sosial maupun nasional, penguatan sistem industri secara nasional, serta memberikan dukungan terhadap produk ekonomi tingkat local yang berdiri secara mandiri.
 3. Menerapkan sistem gotong royong sebagai salah satu karakter bangsa. Dengan mewujudkan sistem ini maka dapat menjamin terlaksananya sistem pendidikan secara nasional yang terstruktur dan memberikan jaminan berupa hak untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Menciptakan jiwa solidaritas nasional dengan menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menerapkan budaya gotong royong sebagai sebuah amalan yang diterapkan dalam hidup keseharian. Sehingga diharapkan budaya ini dapat menciptakan karakter bangsa yang memiliki harkat dan martabat serta kesiapan untuk menopang negara dalam kehidupan nasional.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Nasdem

- a. Partai Nasdem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.
- b. Fungsi Partai Nasdem
 1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
 3. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
 4. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi.
 5. Menegakkan keadilan sosial dan supremasi hukum.
 6. Memenuhi hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
 7. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

3. Sistem Kaderisasi dan Rekrutmen Anggota Partai Nasdem

A. Sistem Kaderisasi Partai Nasdem

Pada AD/ART Partai Nasdem Bab VI Pasal 13 tentang sistem kaderisasi dikatakan struktur kader Partai Nasdem terdiri sebagai berikut :

1. Kader Tunas merupakan anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
2. Kader Dasar merupakan anggota yang telah menjalani kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang atau Organisasi Sayap Partai di tingkat Kabupaten atau Kota.
3. Kader Madya merupakan anggota yang telah menjalani serangkaian kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau Organisasi Sayap Partai di tingkat Provinsi.
4. Kader Paripurna merupakan anggota yang telah menjalani serangkaian kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Anggota Kehormatan merupakan orang yang telah berjasa dalam memperjuangkan partai dan telah dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

B. Rekrutmen Anggota Partai Nasdem

Pada AD/ART Partai Nasdem Bab X Pasal 15 tentang rekrutmen anggota Partai Nasdem dikatakan sebagai berikut :

1. Setiap individu dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Nasdem apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai Nasdem.
2. Partai Nasdem melaksanakan proses perekrutan terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
3. Tata cara perekrutan anggota telah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

C. Rekrutmen Jabatan Politik

Pada AD/ART Partai Nasdem Bab XI Pasal 16 tentang rekrutmen jabatan politik Partai Nasdem dikatakan sebagai berikut :

1. Partai Nasdem menjalankan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk ditetapkan sebagai calon pejabat politik:
 - a. calon Presiden dan/atau Wakil Presiden
 - b. calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
 - c. calon Bupati dan/ atau Wakil Bupati
 - d. calon Walikota dan/atau Wakil Walikota
 - e. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
 - f. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
2. Setiap individu dapat mendaftarkan diri sebagai calon pejabat politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila dapat terpenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Ketentuan selanjutnya terkait rekrutemen jabatan politik dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud telah diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Partai NasDem.

B. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jepara

Partai Nasdem yang berkedudukan di tingkat daerah Kabupaten atau Kota berada dibawah struktur partai Nasdem tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Nasdem Nomor : M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 272-Kpts/DPP-NasDem/VI/2022. Kepengurusan periode 2022-2024 DPD partai Nasdem Kabupaten Jepara resmi menjalankan tugas menggantikan kepengurusan yang lama setelah dilantik pada tanggal 23 Juni 2022.

Proses pelantikan dilakukan oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah Partai Nasdem Lestari Moerdijat, sebagai tanda dilantiknya ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara. Ketua DPW Lestari Moerdijat menyerahkan bendera partai sebagai simbolis partai kepada H. Pratikno sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara yang baru. Dengan jumlah pengurus sebanyak 36 orang dan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 12 orang dengan presentase keterwakilan sebesar 33.33%. Kantor sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara berada di Jl. KM Sukri No. 66 RT 4 RW 5 Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara.

Berikut struktur susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2 Struktur Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Jepara

I. DEWAN PIMPINAN DAERAH	
Ketua	Pratikno
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Padmono Wisnugroho, SH
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan	John Henry
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik	Ahmadun
Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif	Sunarto
Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif	Abdus Somad Sofari
Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan	Ahmad Zaidi
Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas	Aswin Helmi Arditianto
Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial	Gatot Priambodo Agusta
Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber	Agus Eko Setyawan
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik	Rita Haryani
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Alfiyatun

Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Sumiatun
Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat	Failasofa Shidqi Novian
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja	Sari Fainzah
Wakil Ketua Bidang Kesehatan	Munawi
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	Sri Dariyani
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jati Susetyono
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Muhammad Nurul Hidayat
Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif	Farah Elfirajun, AG
Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa	Legini
Wakil Ketua Bidang Maritim	Purwanto
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Sugiono, S.Ag., M.H
Wakil Ketua Bidang Energi dan Mineral	Nailul Faroh
Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup	Nurul Widiyawati
Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang	Arlisfian Tegar Wijaya
Wakil Ketua Bidang Migran	Noor Azizah
Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	Jumar
Sekretaris	Nur Hidayat
Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis	Erkham Sobri
Wakil Sekretaris Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi	Syamsul Anwar
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu	Imron Abdul Khamal
Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi	Itsna Maulida
Bendahara	Muchasin
Wakil Bendahara Pengelolaan Dana dan Aset	Mucharomatin
Wakil Bendahara Penggalangan Dana	Eny Zuliysana

Sumber : DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara

C. Garda Wanita Malahayati Nasdem Kabupaten Jepara

Salah satu hak dari partai politik di Indonesia berdasarkan Pasal 12 J U U A Quo menetapkan bahwa partai politik berhak membentuk dan

mempunyai organisasi sayap politik. Salah satu Organisasi sayap politik yang dibentuk oleh Partai Nasdem yakni Garda Wanita Malahayati lahir untuk melaksanakan kebijakan partai, memperkuat pondasi dukungan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis partai dalam proses pemilihan umum, dan memperkuat fungsi serta peran partai politik dalam masyarakat terutama bagi kaum perempuan.

Garda Wanita Malahayati merupakan organisasi otonom sebagai wadah bagi kader perempuan dalam partai Nasdem untuk dapat berperan dan berpartisipasi tidak hanya dalam sektor politik melainkan juga dalam kegiatan ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan. Organisasi sayap politik perempuan ini bertujuan sebagai sarana penyadaran politik untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam dunia politik demi menciptakan politisi perempuan yang mengutamakan kapabilitas, integritas dan imparsialitas.

Selain itu, Garda Wanita Malahayati berfungsi untuk menarik partisipasi politik perempuan dan pemberdayaan sayap politik perempuan. Garda Wanita Malahayati merupakan organisasi sayap partai yang memiliki tujuan untuk memperjungkan hak perempuan dan berkontribusi sebagai upaya untuk terus meningkatkan peran perempuan di berbagai elemen kehidupan sosial. Pembentukan Garda Wanita Malahayati didasarkan atas pemikiran gender, dimana perempuan berhak diberikan kebebasan untuk terlibat dalam proses penentuan keputusan dan berbagai aktivitas kebijakan politik. Garda Wanita Malahayati Nasdem menjalankan program kegiatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan electoral dan membesarkan partai Nasdem sebagai organisasi sayap perempuan Partai Nasdem.

Berdasarkan hasil keputusan Kongres I pada tanggal 25-26 Januari 2013 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Nasdem. Garda Wanita Malahayati (Garnita) merupakan salah satu sayap

dari Partai Nasional Demokrat yang lahir pada tanggal 19 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) No. SKEP-004/DPP-Nasdem/II/2013 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem BAB XVI Pasal 25 terkait Keterwakilan Perempuan dan BAB V pasal 14 terkait Pembentukan Sayap Partai Nasdem.

1. Visi dan Misi Garda Wanita Malahayati Nasdem

- a. Visi Garda Wanita Malahayati Nasdem adalah tercapainya keterwakilan perempuan secara proposional guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam memperjuangkan cita-cita negara kesatuan republik Indonesia.
- b. Misi Garda Wanita Malahayati Nasdem
 1. Misi 1 : Sosialisasi konsep restorasi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara guna meningkatkan posisi tawar daya saing bangsa Indonesia di era globalisasi.
 2. Misi 2 : Membangun kesadaran masyarakat pentingnya setara perempuan dalam partisipasi aktif di segala aspek kehidupan.
 3. Misi 3 : Meningkatkan, menguatkan peran dan posisi perempuan dalam mewujudkan tata kelola negara secara efektif di semua sektor.

2. Tujuan dan Fungsi Garda Wanita Malahayati Nasdem

Tujuan Garda Wanita Malahayati Nasdem adalah menghimpun, membina dan memberdayakan potensi perempuan untuk memperkuat peran dan posisi perempuan secara Nasional, demi terwujudnya kader perempuan yang sejalan dengan cita cita Indonesia yang adil dan makmur. Dengan memberikan tempat kepada perempuan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan setara kedudukannya dengan kaum laki-laki terutama dalam proses pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Perempuan

dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada para wanita melalui partai politik untuk melakukan konsolidasi melalui berbagai kegiatan sosial.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Jepara memberikan ruang bagi perempuan untuk terjun di dunia politik melalui partai Nasdem dan membentuk pelembagaan bagi wanita dalam organisasi sayap partai Garda Wanita Malahayati yang terlembaga dibawah perlindungan partai Nasdem. Beberapa kegiatan konsolidasi yang dilakukan oleh Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara menunjukkan pembuktian terhadap keterlibatan perempuan di partai politik.

Seiring berdirinya Partai Nasdem dari tahun 2011 Garda Wanita Malahayati Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 01-SK-P/DPP-GM/X/2013 tentang Organisasi Sayap Perempuan Partai Nasdem. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Nomor: 013.SE/DPP-NasDem-JPR/II/2019, kepengurusan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara resmi dibentuk dan menjalankan tugas kepengurusan baru setelah dilantik. Garda Wanita Malahayati Kabupaten Jepara periode 2013-2018 diketuai oleh Ibu Asfiah dan digantikan oleh Ibu Farah Elfrajun pada kepengurusan periode 2019-2024.

Struktur kepengurusan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Tabel 3 Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara

I.	DEWAN PEMBINA	
	Ketua	Hj. Alfiyatun

	Sekretaris	Purwaningsih
II.	DEWAN PAKAR	
	Ketua	Hj. Asfiah
III.	DEWAN KODE ETIK	
	Ketua	Devi Suharnani, SH.
IV.	DEWAN PENGURUS	
	Ketua Umum	Dra. Farah Elfirajun. AG
	Wakil Ketua Umum	Sri Dariyani
	Sekretaris	Rita Haryani , S.Pd
	Wakil Sekretaris	Hana Kristina
	Bendahara	Nailul Faraoh, S.Sos
	Wakil Bendahara	Noor Azizah
V.	DEPARTEMEN IDEOLOGI ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	
	Ketua	Sri Andayani
	Sekretaris	Ninik Wahyuni
VI.	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Ketua	Sianita Aringgi
	Sekretaris	Dewi Fadlilatul Lailiyah,S.Sos
VII.	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM	
	Ketua	Mar'atun Azizah, S.H
	Sekretaris	Zulin Martantin, S.H
VIII.	DEPARTEMEN HUBUNGAN SAYAP DAN BADAN	
	Ketua	Yayuk Mulyati
	Sekretaris	Isrofiyati, S.Sos
IX.	DEPARTEMEN PEMILIH PEMULA DAN MILENIAL	
	Ketua	Nur Fatikhah
	Sekretaris	Desi Sitorus
X.	DEPARTEMEN PEREMPUAN DAN ANAK	
	Ketua	Sri Purwantini
	Sekretaris	Winarti
XI.	DEPARTEMEN EKONOMI DAN UMKM	
	Ketua	Solikhatun Nisak
	Sekretaris	Sumiatun
XII.	DEPARTEMEN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Ketua	Sari Fainzah
	Sekretaris	Lilik Zumrotun
XIII.	HUBUNGAN INTERNASIONAL	
	Ketua	Pricilia Yingnie Mawuntu
	Sekretaris	Vicenza Aulia Nur C
XIV.	DEPARTEMEN PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF	
	Ketua	Dinawati
	Sekretaris	Anggraini Cahaya
XV.	DEPARTEMEN AGAMA DAN MASYARAKAT ADAT	
	Ketua	Sutimah
	Sekretaris	Hj. Lailatus Sholikhah

Sumber : DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara

BAB IV

SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA PEREMPUAN GARDA WANITA MALAHAYATI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DI KABUPATEN JEPARA

A. Sistem Perekrutan Anggota Perempuan Dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem

Partai politik merupakan institusi resmi yang menjalankan prosedur perekrutan anggota politik sebagai proses dalam pengisian jabatan politik. Setiap partai politik pasti mempunyai sistem politik dan proses yang tidak sama dalam prosedur rekrutmen politik. Sistem rekrutmen politik dianggap memiliki nilai penting karena menjadi awal mula bagi partai politik untuk menjaring dan mendapatkan politisi yang berkualitas, yang nantinya akan membangun dan menjalankan kepengurusan partai politik. Sistem perekrutan politik merupakan salah satu metode yang digunakan oleh partai politik untuk mengisi jabatan politik bagi keanggotaan partai politik, calon anggota legislative baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah, calon presiden dan wakil presiden serta calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Mekanisme perekrutan yang dijalankan oleh Partai Nasdem harus dilakukan dengan mengedepankan asas demokratis dan transparan sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasdem. Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mekanisme rekrutmen kepengurusan partai politik dilakukan dengan cara memilih kandidat yang nantinya akan ditetapkan sebagai pengurus partai untuk memenuhi fungsi partai sebagai salah satu sarana untuk membangun demokrasi. Melalui proses rekrutmen politik anggota partai akan ditempatkan dalam jabatan pemerintahan, sebagai salah satu upaya strategis partai dalam menjalankan peran dalam sistem politik dan pemerintahan.

Melalui sistem rekrutmen secara demokratis dan terbuka dapat menghasilkan kualitas anggota partai yang nantinya memiliki kemampuan untuk dapat menghadapi persoalan dan tantangan yang berkembang dalam kehidupan politik masyarakat. Sehingga diharapkan melalui proses rekrutmen politik dapat memunculkan anggota partai yang profesional, berintegritas dan berkualitas. Proses rekrutmen partai politik dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni, sistem perekrutan terbuka dan sistem perekrutan secara tertutup. Sistem rekrutmen terbuka merupakan sistem perekrutan politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin memasuki dunia politik maupun mengisi jabatan politik dalam pemerintahan.

Terbukanya sistem perekrutan dalam partai politik dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan pemerintah dalam menerapkan sistem demokrasi. Sehingga, terbukanya sistem demokrasi dalam suatu negara memberikan kemudahan pada masyarakat untuk dapat menentukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kualitas dan integritas. Selanjutnya, sistem perekrutan tertutup merupakan sistem rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik, dengan memberikan kesempatan kepada individu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh elit partai politik untuk mengisi jabatan tertentu dalam struktur pengurus partai politik. Biasanya individu tersebut memiliki kedekatan dengan elit partai politik atau memiliki latar belakang yang sama, sehingga memiliki kemudahan untuk masuk didalamnya.

Metode perekrutan politik yang biasa diterapkan oleh partai politik di Indonesia, diantaranya : Pertama, sistem rekrutmen politik lewat proses penjangkaran. Dimana partai politik bersosialisasi dan memperkenalkan partai pada masyarakat yang nantinya akan direkrut untuk bergabung dalam partai. Kedua, mekanisme rekrutmen partai politik melalui proses penyaringan kepada calon kader anggota partai yang akan mendaftarkan diri. Proses penyaringan tersebut dilakukan oleh partai politik dengan cara menentukan beberapa syarat kriteria ideal kepada calon kader yang akan mendaftar. Ketiga,

mekanisme rekrutmen politik berupa proses penetapan keanggotaan yang telah disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik. Selanjutnya proses penetapan calon kader akan ditetapkan lebih lanjut dalam rapat pengurus partai.

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, berkumpul dan menggunakan hak pilih. Selain itu, demokrasi menciptakan kesempatan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem demokrasi keterlibatan masyarakat merupakan suatu kepentingan yang tidak dapat dihiraukan, terutama peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun, sistem demokrasi terutama dalam sektor publik lebih didominasi oleh peran laki-laki, sehingga perempuan dianggap kurang memiliki peran dan tidak perlu terlibat didalamnya. Oleh karena itu, diharapkan demokrasi dapat menciptakan sistem berbasis kesetaraan gender yang dapat melibatkan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Keterlibatan perempuan yang berperan dalam politik dan pemerintahan seringkali dikaitkan dengan kesetaraan gender yang ditetapkan sebagai indikator dalam mencapai kebijakan terkait keterwakilan perempuan. Proporsi kursi dan jumlah perempuan dalam keanggotaan partai politik maupun lembaga perwakilan rakyat merupakan upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi serta peran politik perempuan. Keberadaan perempuan yang memiliki akses berpolitik jelas sangat diperlukan sebagai perwakilan perempuan sehingga kepentingan perempuan dapat selalu diperjuangkan. Penetapan kebijakan afirmasi menjadi indikasi bahwa perempuan dapat memiliki ruang bebas untuk berperan dalam dunia politik karena adanya kesetaraan gender. Sebagaimana ditegaskan oleh Mansour Fakhri bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang membuat kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki peran dalam kehidupan sosial.

Garda Wanita Malahayati merupakan organisasi sayap partai Nasdem yang memiliki peran penting terutama dalam proses rekrutmen politik dan

kaderisasi partai politik. Sistem rekrutmen melalui Garda Wanita Malahayati dianggap lebih mudah, karena ideologi partai politik dianggap lebih mudah dipahami secara optimal oleh calon kader melalui organisasi sayap partai. Sistem rekrutmen politik menjadi metode yang paling tepat untuk memperluas jaringan partai politik. Pelaksanaan sistem rekrutmen politik melalui Garda Wanita Malahayati dianggap lebih efisien dan memiliki keuntungan besar, daripada sistem rekrutmen politik yang dijalankan menggunakan metode penjangkaran diluar organisasi sayap Partai Nasdem.

Selain itu, metode penjangkaran diluar organisasi sayap partai Nasdem dianggap lebih beresiko. Karena adanya ketidaksesuaian terkait pemahaman ideologi antara Partai Nasdem dengan calon anggota yang akan direkrut. Sehingga partai politik akan mengalami kesulitan karena terjebak dalam kondisi pragmatisme, dimana para calon anggota partai hanya menggunakan Partai Nasdem sebagai sarana untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Garda Wanita Malahayati menjadi alat yang dipakai oleh partai Nasdem untuk mendapatkan suara dukungan politik menjelang masa pemilihan umum dan menjadi sarana media berbasis pendidikan serta kegiatan pelatihan bagi kader partai. Sehingga, diharapkan Garda Wanita Malahayati dapat menjadi pelopor sistem rekrutmen politik perempuan yang transparan, demokratis dan akuntabel sehingga dapat menciptakan kader partai perempuan yang siap terjun ke partai politik dengan kapasitas dan kapabilitas yang semakin berkualitas.

1. Sistem Perekrutan Anggota Perempuan Partai Nasdem Kabupaten Jepara

Melalui organisasi sayap partai, DPD partai Nasdem kabupaten Jepara menggunakan Garda Wanita Malahayati sebagai sarana dan sumber rekrutmen untuk mencari politisi perempuan yang berintegritas dan berkualitas, serta menjadi penghubung bagi perempuan agar dapat menempati jabatan dalam pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam Partai Nasdem berada dibawah naungan organisasi sayap partai Garda Wanita Malahayati. Melalui Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem

menempatkan perempuan dalam peran strategis untuk bergabung dalam struktur kepemimpinan dan kepengurusan di partai politik.

Ibu Farah Elfirajun selaku Ketua Garda Wanita Malahayati DPD Nasdem Kabupaten Jepara mengungkapkan bahwa :

“Garda Wanita Malahayati memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi bagi politisi perempuan. Garda Wanita Malahayati berfungsi sebagai sarana dan sumber rekrutmen untuk menarik kaum perempuan yang ingin memasuki dunia politik, sekaligus mencari kader politisi perempuan yang berkualitas sebagai calon anggota legisaltif perempuan yang nantinya akan dipilih dan diusung oleh partai Nasdem pada pemilihan umum. Sehingga secara tidak langsung kebijakan yang dimiliki oleh partai Nasdem berkesinambungan dengan program kerja yang dimiliki oleh Garda Wanita Malahayati dan menjadi penghubung relasi antara partai Nasdem dengan politisi perempuan” (wawancara, Ibu Farah Elfirajun, 15 April 2023).

DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menjalankan fungsi kaderisasi secara terstruktur dengan memperhatikan ketentuan sistem rekrutmen anggota partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Nasdem. Adanya divisi yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen serta jadwal dan waktu yang sudah ditentukan dalam masa pendaftaran sehingga nanti dapat ditentukan hasilnya.

Proses rekrutemen politik hanya dilakukan oleh organisasi inti, yaitu Partai Nasdem bukan melalui organisasi sayap partai. Sifat kaderisasi dalam organisasi sayap perempuan Garda Wanita Malahayati sesuai dengan fungsi rekrutmen politik yakni untuk menarik dan memperluas keanggotaan partai. Fungsi kaderisasi yang dijalankan oleh Partai Nasdem dilaksanakan secara ketat dan terpusat hanya oleh Dewan Pimpinan Pusat. Selain itu keanggotaan dalam proses kaderisasi tidak menjadi patokan atau syarat mutlak dalam proses pencalonan.

Partai Nasdem memiliki sistem rekrutmen keanggotaan yang sudah disesuaikan dengan ideologi partai dan diatur dalam Anggaran Dasar atau

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasdem melalui surat keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: SKEP-004/DPP-NasDem/II/2013. Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem bertujuan untuk menarik kaderisasi anggota partai dan mendapatkan dukungan massa dalam pemilihan umum tahun 2024. Proses pelaksanaan mekanisme rekrutmen anggota partai Nasdem menjadi tanggung jawab seluruh anggota DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara mulai dari pengurus, anggota fraksi, organisasi sayap partai politik dan organisasi masyarakat yang berada dalam naungan Partai Nasdem.

Sistem rekrutmen politik terbagi dalam 2 sistem, yakni sistem rekrutmen secara terbuka dan sistem rekrutmen secara tertutup. Sistem rekrutmen partai politik secara terbuka merupakan sistem yang dilakukan oleh DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jepara dalam memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, agar dapat memasuki dunia politik dan mengisi jabatan dalam struktur partai politik. DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara melakukan proses pengkaderan kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota partai politik dengan membagikan formulir keanggotaan kepada masyarakat secara terbuka tanpa adanya unsur paksaan untuk bergabung dengan Partai Nasdem.

Proses perekrutan anggota Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara dilakukan secara bertahap dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Jepara. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan esistensi partai kepada masyarakat melalui promosi, kegiatan sosial, dan kegiatan organisasi sayap partai agar masyarakat tertarik dan memiliki keinginan untuk ikut bergabung mendaftarkan diri sebagai anggota partai Nasdem. Masyarakat yang memiliki keinginan untuk bergabung sebagai anggota partai Nasdem hanya perlu mengisi formulir pendaftaran keanggotaan dengan menyertakan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan selanjutnya akan dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara. Sedangkan,

sistem perekrutan anggota partai yang ingin mendaftar sebagai calon anggota legislative dilakukan melalui proses penjaringan, penyaringan dan penetapan sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah diatur serta ditetapkan oleh Partai Nasdem dalam peraturan partai.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dalam wawancara :

“Partai Nasdem sebagai partai nasionalis yang religious sangat terbuka terkait penjaringan atau perekrutan anggota Nasdem. Formulir pendaftaran bahkan dapat diakses secara online maupun komunikasi secara personal dengan pengurus, sehingga ada dua sistem tersebut yakni secara online dan langsung baik secara terbuka maupun tertutup. Walaupun partai di Kabupaten Jepara sangat banyak dengan ideologi yang berbeda-beda namun Partai nasdem di Jepara banyak dinikmati oleh kader baik tua maupun kaum milenial. Anggota Partai Nasdem yang sudah berKTA di Kabupaten Jepara sejumlah 27.000 orang lebih. Aturan partai tentang rekrutmen politik Partai Nasdem mengacu pada aturan pusat tetapi secara formil telah diatur oleh pusat dan syarat-syarat untuk memasuki partai nasdem juga cenderung mudah tidak terlalu sulit. Jika masyarakat tertarik dengan Partai Nasdem dan ingin masuk dalam keanggotaan akan kami buat KTA cukup dengan mengisi formulir, apalagi saat ini KTA partai Nasdem sudah dapat diakses secara online sehingga hanya menunggu beberapa saat saja sudah jadi sehingga tidak terlalu sulit berbeda dengan dulu yang manual sehingga sudah berbentuk digital dan dapat dicetak kapan saja” (wawancara, Bapak Pratikno, 18 Mei 2023).

Sikap yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem di Kabupaten Jepara mencerminkan sifat keterbukaan sebagai tanda berjalannya prinsip demokrasi yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan sistem rekrutemen politik secara terbuka DPD Partai Nasdem memperhatikan beberapa aspek, diantaranya: latar belakang pendidikan, kemampuan dalam menghadapi masalah, kesetiaan pada organisasi, pengalaman kegiatan sosial dan pengalaman organisasi.

Dalam proses perekrutan anggota, Partai Nasdem mengedepankan prinsip demokratis untuk menghasilkan kandidat politik yang berkualitas yang memiliki kapasitas, legitimasi, integritas dan modal sosial di

masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai hal, aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi kader perempuan untuk dapat memasuki jabatan tertentu dalam struktur partai politik dalam DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara.

Sistem rekrutmen yang diterapkan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara jelas sangat memperhatikan keberadaan perempuan dengan adanya program kerja berbasis kesetaraan gender yang melibatkan peran perempuan dalam berbagai proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan di Partai Nasdem sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% dengan jumlah pengurus sebanyak 36 dan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 12 orang dengan presentase keterwakilan sebesar 33.33%.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rita Haryani selaku Sekretaris Garnita Malahayati DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dalam wawancara :

“Proses kandidasi yang dilakukan dalam Garda Wanita Malahayati di Kabupaten Jepara terbilang cukup mudah. Selain sebagai usaha Partai Nasdem untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, terutama lebih ditempatkan dalam kepengurusan partai atau dalam penetapan calon legislatif, proses seleksi yang terjadi di lingkungan Partai Nasdem terbilang cukup mudah dikarenakan rendahnya minat dari perempuan di Kabupaten Jepara untuk masuk dalam dunia politik dan masih berlakunya sistem rekrutmen secara tertutup. Namun, melalui sistem rekrutmen secara tertutup elit Partai Nasdem lebih mudah memahami figure kader perempuan yang akan menjadi pengurus partai mulai dari latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya” (wawancara, Ibu Rita Handayani, 15 April 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa sistem rekrutmen kader perempuan tersebut pada akhirnya tidak mencerminkan aspek eksklusif dan inklusif, karena menggabungkan sistem rekrutmen sebagai pola campuran atau semi terbuka. Sehingga dapat dilihat bahwa Partai Nasdem lebih mengutamakan terpenuhinya kapasitas keterwakilan

perempuan dalam partai, tanpa memperhatikan kapasitas dan kapabilitas kader perempuan. Selain itu dalam proses seleksi dan perekrutan kader, partai politik cenderung fleksibel sehingga membuat keadaan dalam internal partai menjadi stagnan sehingga memperlambat proses regenerasi politik. Keadaan tersebut membuat partai politik menjadi monoton dan hanya dipenuhi oleh tokoh lama dengan pemikiran dan pengalaman yang tidak mengalami perkembangan.

2. Kriteria dan Syarat Khusus bagi Calon Anggota Perempuan Partai Nasdem

DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menerapkan beberapa kriteria dan syarat perekrutan yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan bagi Partai Nasdem dalam menyeleksi calon anggota partai. Beberapa kriteria tersebut diantaranya dilakukan pendekatan secara politis kepada calon anggota untuk mencari anggota yang memiliki fleksibilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap Partai Nasdem. Jenjang karir dan track record tidak terlalu dihiraukan dalam partai. Partai Nasdem juga menerapkan hal serupa dalam proses rekrutmen untuk mencari pengurus Partai.

Mekanisme perekrutan politik yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem memiliki tujuan untuk menghasilkan kandidat politisi yang memiliki kredibilitas, kompetibel, berintegritas dan loyalitas kepada organisasi. Partai Nasdem mengharapkan sistem perekrutan politik yang diterapkan dapat menghasilkan politisi yang berkualitas. Sebagai bukti penerapan fungsi perekrutan partai politik untuk mempersiapkan politisi yang memiliki kapasitas untuk memegang jabatan di lembaga legislative maupun eksekutif.

Pelaksanaan sistem rekrutmen politik di Partai Nasdem mencakup rekrutmen anggota partai politik, rekrutmen pengurus partai politik, rekrutmen calon anggota legislative dan rekrutmen calon kepala daerah atau

calon wakil kepala daerah. Partai politik jelas memegang peran penting dalam proses rekrutmen politik karena secara langsung maupun tidak langsung proses pengisian jabatan dalam pemerintah atau rekrutmen pejabat kenegaraan berawal dari partai politik.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dalam wawancara :

“Partai Nasdem memberi ruang terhadap banyak profesi untuk dapat masuk dalam organisasi sayap Partai Nasdem. Untuk kriteria dan syarat khusus yang terpenting dapat memahami ideologi Nasdem yakni nasionalis religious dan toleransi tanpa membedakan agama sehingga dapat sesuai dengan filosofi para pendiri negara. Partai Nasdem digambarkan sebagai sebuah miniature negara yang sangat terbuka bagi siapa saja, jadi masyarakat sangat dipersilahkan untuk memilih ruang sesuai dengan apa yang dinikmatinya. Jika berminat dengan dunia pertanian Partai Nasdem memiliki organisasi sayap partai bernama petani Nasdem sehingga masyarakat secara terbuka dapat masuk dan ikut memberikan manfaat didalamnya, apalagi pertanian merupakan salah satu fundamental ekonomi pangan Indonesia sehingga sangat berpengaruh pada kemajuan negara. Partai Nasdem memberi ruang bebas bagi semua pihak untuk masuk dalam keanggotaan Partai Nasdem” (wawancara, Bapak Pratikno, 18 Mei 2023).

Dalam proses perekrutan calon anggota dan pengurus partai Nasdem lebih fleksibel sehingga siapa saja dapat menjadi anggota partai asal memiliki ideologi yang sama dengan cita-cita Partai Nasdem. Calon anggota Partai Nasdem tidak diharuskan lahir dari angkatan muda, tetapi cukup untuk menjaring anggota yang dapat mengharumkan dan membesarkan nama partai serta mematuhi aturan partai sebagaimana dengan apa yang sudah diatur dalam AD/ART partai dan memiliki loyalitas serta kecintaan yang sangat tinggi kepada partai Nasdem. Sedangkan dalam mengawasi kepengurusan partai, segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh partai Nasdem selalu merujuk serta mempertimbangkan pada AD/ART Partai dan Dewan Pengawas Partai.

Mulai dari pengawasan pada tingkat pengurus pusat hingga kepengurusan yang ada dibawahnya termasuk sertiap kader partai yang

melanggar peraturan partai. Namun dalam proses perekrutan pengurus partai, DPD Partai Nasdem tidak terlalu berfokus pada ketentuan tersebut dalam mencari jabatan pengurus sehingga semua urusan terkait rekrutmen pengurus diserahkan pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai Nasdem dalam memilih jabatan pengurus tidak memiliki ketentuan dan kejelasan khusus serta mengesampingkan AD/ART Partai dalam proses perekrutan pengurus sehingga membuat proses perekrutan yang dijalankan oleh Partai Nasdem menjadi tidak demokratis dan tidak transparan.

Berdasarkan sistem rekrutmen politik diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses rekrutmen anggota yang dilaksanakan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menggunakan pola gabungan atau prosedur semi terbuka, yakni sistem rekrutmen secara terbuka dan rekrutmen secara tertutup dengan mengutamakan internal partai sebagai penguatan agar mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Sumber Perekrutan Politik Calon Anggota Perempuan Partai Nasdem

Bentuk dan pola sistem perekrutan politik yang diimplementasikan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara berbentuk demokrasi berdasarkan pertimbangan dari hasil ujian baik berupa ujian tes tertulis dan ujian tes lisan melalui sistem wawancara, walaupun beberapa keputusan tetap dipengaruhi oleh otoritas partai itu sendiri. Dalam menciptakan kader politik yang berkualitas perlu diperhatikan semangat demokrasi dan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam diri setiap kader seperti kesetaraan, representasi serta menghargai perbedaan pendapat sesuai yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Keberadaan nilai-nilai Pancasila tersebut harus menjadi kepribadian mutlak yang menduduki serta mengisi jabatan dalam partai politik, sehingga diharapkan partai politik dapat mengimplementasikan fungsi partai politik sebagai sarana penghubung dan wadah aspirasi bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sebagai salah satu organisasi besar di Kabupaten Jepara DPD Partai Nasdem telah memenuhi kelengkapan struktur dalam kerangka organisasi. Namun dalam sebuah organisasi bukan cuma dibutuhkan kelengkapan anggota saja tetapi juga sumber daya manusia yang dapat memenuhi ketersediaan jabatan politik dalam pemerintahan. Sehingga dapat sesuai dengan tujuan dan fungsi partai sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan, mengambil dan mempertahankan sebuah kekuasaan demi mengupayakan kebijakan yang nantinya berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dan team seleksi Partai Nasdem terlihat bahwa :

“Partai Nasdem memberi ruang bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik karena Partai Nasdem menyadari emansipasi bahwa perempuan dan laki-laki dapat sejajar. Namun sangat disayangkan di Kabupaten Jepara sendiri untuk mencari kaum perempuan yang mau berkiprah di dunia politik terus terang memang kurang, karena kaum perempuan saat terjun di dunia politik dianggap mengganggu kepentingan lain seperti kepentingan rumah tangga atau lainnya. Sehingga Partai Nasdem memiliki sasaran seperti kaum muda milenial untuk bergabung dalam partai agar dapat memberi sumbangsih pemikiran, supaya kepedulian terkait kebijakan terhadap perempuan tetap ada. Oleh karena itu, DPP Partai Nasdem sedang memperjuangkan undang undang perlindungan perempuan dan anak sebagai salah satu konsern Partai Nasdem kepada perempuan agar dimarginalkan dan tidak diberi batasan” (wawancara, Bapak Pratikno, 18 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Jepara masih sangat terbatas terutama dari kaum perempuan. Namun, DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara selalu mengusahakan berbagai strategi agar ketersediaan sumber daya perempuan tetap dapat menonjol terutama dalam menjadi kandidat calon anggota legislative, agar dapat sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang keterwakilan perempuan yang mengharuskan partai politik dalam proses seleksi kontestasi pemilihan umum harus mampu mewakili keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Terbatasnya sumber daya manusia terutama dalam internal Partai Nasdem dapat berpengaruh terhadap tingkat kriteria yang nantinya merupakan syarat wajib bagi calon anggota partai dalam proses seleksi.

Secara tidak langsung proses rekrutmen politik mempengaruhi kualitas individu yang masuk dalam Partai Nasdem, karena kriteria yang telah ditetapkan oleh partai politik tidak lagi relevan akibat keterbatasan sumber daya manusia dalam proses perekrutan anggota Partai Nasdem. Situasi tersebut jelas sangat berdampak terhadap kesepakatan yang ditentukan oleh Partai Nasdem terkait kriteria dan syarat dalam proses seleksi sumber daya manusia yang nantinya akan masuk dalam internal partai. DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara memiliki dukungan yang besar dalam menentukan kualitas kandidat calon anggota yang nantinya akan ikut bersaing dalam proses pemilihan umum. Dukungan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan partai dalam memberikan tempat bagi kader sebagai pemenang dalam proses seleksi politik melalui pemilihan umum.

Dapat dilihat adanya indikasi pengumpulan calon anggota kader Partai Nasdem dengan menggunakan sistem terbuka agar terjadinya pelebaran organisasi sayap partai sebagai upaya dalam melaksanakan tujuan partai. Dalam proses perekrutan anggota Partai Nasdem membentuk beberapa organisasi sayap partai politik agar mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Organisasi sayap partai politik tersebut juga bertujuan untuk merekrut calon anggota partai melalui pola dan mekanisme seleksi yang sudah ditetapkan dalam peraturan partai atau AD/ART Partai Nasdem. Organisasi sayap partai yang telah dibentuk oleh partai Nasdem, diantaranya yakni Garda Wanita (Garnita Malahayati), Garda Pemuda, Garda Advokasi (Badan Advokasi Hukum), Gerakan Massa Buruh, Petani Nasdem, Nelayan Nasdem, dan Liga Mahasiswa.

Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menjelaskan dalam wawancara :

“Partai Nasdem tidak memiliki strategi khusus dalam menarik calon kader partai. Adanya keinginan masyarakat untuk masuk dalam suatu partai pasti melihat dari latar belakang partai tersebut apakah memberi asas bermanfaat atau tidak. Mulai tahun 2012 sampai sekarang Partai Nasdem selalu berikhtiar agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan banyak yang menyukai Partai Nasdem sehingga banyak keinginan untuk masuk dalam partai. Upaya yang dilakukan Partai Nasdem untuk menarik perhatian masyarakat melalui memberi, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memberi edukasi dan pemahaman yang dilakukan oleh kader setiap hari untuk terjun dalam lapangan. Sehingga masyarakat yang dapat berpikir secara rasional pasti akan memilih partai yang tidak hanya sekedar didirikan atau pragmatis. Dengan visi misi restorasi Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kejalan yang benar, Bapak Surya Paloh selaku pendiri Partai Nasdem memberi kebijakan kepada Partai Nasdem sebagai partai anti mahar. Partai Nasdem mengharamkan mahar politik untuk rekomendasi suatu jabatan. Dalam pencalegan tahun ini nasdem tidak meminta kontribusi kepada caleg justru Partai Nasdem memberi pelayanan dan membantu administrasi kepada caleg yang tidak mampu demi kelancaran proses itu semua sehingga Partai Nasdem dapat dikatakan sebagai partai yang berbeda dengan partai lainnya” (wawancara, Bapak Pratikno, 18 Mei 2023).

Seiring berjalannya waktu Partai Nasdem semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Jepara. Sejauh ini kualitas rekrutmen calon anggota partai terlihat sangat baik dan sudah terstruktur, dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum calon anggota legislative di Kabupaten Jepara pada tahun 2014 dan 2019. Sebagai partai yang menerapkan konsep politik tanpa mahar Partai Nasdem sukses memenangkan 5 anggota untuk menduduki jabatan di kursi DPRD dan pada tahun 2019 DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara mendapatkan tambahan 2 kursi sehingga menjadi 7 kursi.

Partai Nasdem memunculkan konsep tanpa mahar politik sebagai sebuah konsep untuk menghilangkan biaya bagi dukungan partai politik terhadap individu yang ingin mencalonkan diri baik untuk pemilihan anggota eksekutif maupun legislative. Konsep ini merupakan langkah awal Partai Nasdem untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mengalami penurunan, serta mengurangi beban finansial

kandidat sehingga sehingga dapat berkonsentrasi dalam membangun daerah, serta membangun kesadaran bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencari pemimpin yang terbaik bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Konsep politik tanpa mahar merupakan titik awal keberhasilan dan kesuksesan Partai Nasdem dalam pemilihan umum di Indonesia. Sehingga menimbulkan semangat optimisme bagi seluruh jajaran Partai Nasdem bahwa konsep politik tanpa mahar merupakan salah satu kunci Restorasi Indonesia. Saat ini DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara terus menata dan melakukan konsolidasi kembali terhadap struktur partai di semua tingkatan dan mempersiapkan calon anggota legislatif yang sudah direkrut untuk mempersiapkan pemilu pada tahun 2024 dan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 11 mei 2023.

B. Hambatan dan Tantangan Proses Rekrutmen Politik Perempuan

Implementasi peran perempuan dalam proses rekrutmen politik perempuan melalui Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan tersebut dialami oleh perempuan yang ingin memasuki dunia politik, baik secara internal yakni permasalahan pribadi maupun kendala eksternal yang dirasakan oleh perempuan melalui sistem, struktur budaya, maupun lingkungan masyarakat yang saling berdampak terhadap budaya patriarki dalam masyarakat, serta keterbatasan peluang perempuan untuk masuk dalam konstentasi pemilihan umum karena lemahnya daya saing. Sehingga, dapat terlihat berbagai hambatan yang dialami oleh perempuan dalam dunia politik terkait beban pekerjaan, permasalahan pendidikan, kultur patriarki, peran internal, keagamaan dan hambatan serta tantangan yang bersifat umum.

Peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati memang belum terlalu signifikan tetapi banyak program kerja yang mengedepankan kesetaraan gender dan aktif membahas isu terkait kesejahteraan perempuan

dan masyarakat. Hal ini dikarenakan, belum adanya jejak politik yang dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Garda Wanita Malahayati membuat kekuatan massa sebagai pendukung Partai Nasdem masih sangat terbatas. Terbatasnya sumber daya manusia dalam keanggotaan yang dimiliki oleh Garda Wanita Malahayati menjadi sebuah hambatan dalam proses penjangkaran sumber daya masyarakat khususnya perempuan yang sesuai dengan kriteria Garda Wanita Malahayati.

Oleh karena itu, terjadi sebuah kesepakatan dalam internal pengurus partai untuk menentukan dan menetapkan anggota Garda Wanita Malahayati. Selain itu, dalam proses seleksi calon pengurus yang dilakukan oleh Partai Nasdem belum sepenuhnya menunjukkan teknis secara transparan dan akuntabel, sehingga banyak anggota seleksi yang merasa kurang puas dalam proses pendominasian kandidat dalam internal partai. Dalam prakteknya masih sering didominasi oleh elit politik partai yang menjalankan dan menentukan program kerja, sehingga mengarahkan kebijakan dan hasil akhir dari program kerja sebagai keputusan elit organisasi.

Sistem manajemen dalam internal departemen Garda Wanita Malahayati belum dapat berfungsi dengan baik, karena keterbatasan sumber daya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja. Hal ini, dapat mempengaruhi tujuan partai yang bersifat untuk memenuhi kuantitas sumber daya manusia. Namun, tidak berpengaruh terhadap kualitas individu yang dimiliki oleh partai politik. Proses administrasi hanya sebatas formalitas karena proses untuk masuk dalam Garda Wanita Malahayati sangat mudah bahkan dapat ditunjuk langsung tanpa kelengkapan administrasi. Sehingga berbanding terbalik dengan prinsip demokrasi yang seharusnya proses rekrutmen dijalankan secara terbuka, transparan dan demokratis.

Organisasi tidak dapat berjalan secara ideal sesuai dengan prinsipnya jelas mempengaruhi perilaku kader partai dan mengakibatkan terjadinya distorsi terhadap nilai yang ada di internal Partai Nasdem karena minimnya komitmen dari elit dan kader partai dalam menjalankan visi dan misi serta

tujuan organisasi yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai Nasdem. Partai Nasdem seharusnya dapat menjadi organisasi yang berfokus terhadap kualitas dibandingkan kuantitas politisi perempuan dengan melakukan penjaringan, penyaringan secara selektif dan membentuk tim seleksi yang lebih kompetitif serta bebas dari berbagai intervensi kepentingan elit partai. Sehingga dapat menjaring sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan integritas.

Sebagai sebuah organisasi besar, Partai Nasdem dianggap belum mampu untuk mengelola potensi perempuan dalam menjawab berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Proses manajemen internal dalam Garda Wanita Malahayati masih sangat terbatas dan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta kesadaran politik dari kader Partai Nasdem. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Garda Wanita Malahayati dalam proses perekrutan sumber daya anggota, dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa Partai Nasdem merupakan partai baru dalam politik Indonesia dan belum secara menyeluruh dikenali oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk ikut bergabung dalam Garda Wanita Malahayati masih sangat rendah.

Adapun hambatan dan kendala yang dialami oleh Garda Wanita Malahayati dalam menjalankan fungsi kaderisasi diakibatkan oleh keterbatasan wewenang dalam proses rekrutmen politik, sehingga berdampak pada pelaksanaan program kerja partai dan program kerja pengurus. Hambatan tersebut bersifat tidak terduga dan tidak terencana akibat dari keterbatasan sumber daya manusia. Proses kaderisasi secara struktur dilaksanakan oleh organisasi inti melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Sehingga proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem melalui Garda Wanita Malahayati belum dapat berperan secara maksimal.

Garda Wanita Malahayati berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang menjadi kesepakatan dalam internal partai, memiliki wewenang dalam membuat kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disepakati sesuai

bidangnya. Namun, program kerja tersebut bersifat tidak terstruktur dan dirasa belum terlembaga secara baik karena dilaksanakan secara spontan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, masih banyak terjadi kekosongan keanggotaan dalam struktur organisasi Garda Wanita Malahayati sehingga dianggap belum dapat berperan secara maksimal.

Masih terbatasnya sumber daya anggota dalam Garda Wanita Malahayati membuat peran perempuan sangat terbatas dan pedoman awal yang telah ditentukan oleh partai menjadi tidak bermakna karena tidak dapat dijalankan secara maksimal. Melalui slogan restorasi Indonesia dan partai tanpa mahar Partai Nasdem seharusnya dapat lebih menunjukkan diri sebagai partai reformasi yang transparan dan demokratis dan tidak cenderung menjadi partai yang hanya berjalan di tempat saja. Secara ideal Garda Wanita Malahayati belum dapat mengimplementasikan proses manajemen internal sesuai dengan kaidah manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia. Karena, minimnya tingkat partisipasi masyarakat serta kesadaran politik yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, Garda Wanita Malahayati memerlukan politisi perempuan yang memang memiliki integritas, kapabilitas dan kapasitas untuk masuk dalam dunia politik.

BAB V

DAMPAK DIBERLAKUKANNYA SISTEM PEREKRUTAN TERHADAP KOMPOSISI PEREMPUAN DI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

A. Dampak Sistem Perekrutan Terhadap Komposisi Perempuan Di Partai Nasdem

Kaum perempuan jarang dilibatkan dalam proses merumuskan kebijakan dan penentuan keputusan perundang-undangan. Sehingga dianggap tidak condong terhadap perempuan dan jelas sangat merugikan kaum perempuan. Bahkan sangat disayangkan partai politik hanya menggunakan sayap politik perempuan sebagai sarana pelengkap dan simbolisasi politik untuk memenuhi syarat affirmative action. Sayap politik perempuan dalam partai cenderung hanya menunggu keputusan elit partai politik yang oligarki daripada menjadi sebuah organisasi mandiri. Sayap politik perempuan di partai masih kesulitan untuk mendapat ruang gerak politik secara bebas, sehingga sayap politik perempuan partai belum dapat memberikan peran secara penuh dalam proses kandidasi politik untuk mendorong proses perekrutan dan kaderisasi politisi perempuan yang berkualitas dan berintegritas.

Peran perempuan untuk terjun dalam dunia politik tidak hanya dicukupkan dalam bidang birokrasi saja, namun diperlukan adanya peningkatan menuju posisi yang lebih tinggi, dengan tanggung jawab yang semakin luas serta memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dalam partai politik itu sendiri. Selain itu, jabatan dan sikap membedakan jenis gender merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan yang hendak menduduki jabatan, sehingga peristiwa tersebut harus disikapi dengan hati yang sabar serta lebih rasional dalam memberikan tanggapan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan dan peluang bagi perempuan akan semakin terbuka bila mereka memiliki pengalaman dalam menempati sebuah jabatan dan melalui sebuah proses panjang mulai dari

penjaringan, pemilihan sampai penetapan untuk menjadi pengurus partai maupun calon anggota legislative. Sehingga perempuan harus siap memiliki sikap peran gender non tradisional dan memiliki dana finansial yang cukup serta anggota kampanye yang memadai.

Permasalahan perempuan dan isu kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan di partai politik menjadi permasalahan global yang harus segera ditangani, karena pemerintahan yang cenderung didominasi oleh perspektif laki-laki akan lebih menguntungkan pihak laki-laki dan sebaliknya merugikan kaum perempuan. Legitimasi prinsip pemerintahan “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat” tidak dapat berjalan sebagai esensi demokrasi. Hak dan wewenang politik perempuan sebagai sebuah bagian integral yang tidak dapat terpisah dari hak asasi manusia, seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, berdasarkan sudut pandang demokrasi, jumlah perempuan lebih banyak dari setengah jumlah total penduduk, sehingga menjadi sebuah hal yang wajar apabila masyarakat dapat merefleksikan konstituennya melalui bangunan teoritis yakni partai politik.

Dampak negatif dari sikap ketidakpedulian terhadap keterlibatan perempuan dapat terlihat yakni komitmen akan kesetaraan gender yang diamanatkan dalam undang-undang tidak tercapai dan justru malah merusak prinsip negara demokrasi. Sehingga perlunya rekomendasi maupun solusi dari seluruh persoalan tersebut yaitu dengan memberikan dorongan kepada perempuan agar memiliki wawasan terkait dunia politik yang lebih memadai melalui kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kompetensi dalam pendidikan politik bagi perempuan, selain itu, cara yang dapat dilakukan dengan mengawal dan mengawasi proses seleksi rekrutmen politik dan kandidasi dalam partai politik agar dapat memenuhi ketentuan kuota minimal 30% perempuan. Solusi lain yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan yakni dengan melaksanakan proses revisi regulasi agar berbagai kebijakan lebih ramah dan terbuka bagi perempuan, karena seringkali perempuan terhambat karena masalah regulasi.

Pemahaman terkait kesetaraan gender terus diperjuangkan oleh Partai Nasdem, sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban perempuan. Sehingga diperlukan tindakan khusus untuk dapat menyikapi kondisi diskriminasi gender tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk mewujudkan kesetaraan gender yakni dengan meningkatkan partisipasi dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam ruang politik. Semakin banyaknya perempuan yang dilibatkan dalam proses pengambilan dan penetapan keputusan di ruang publik, maka akan semakin banyak melahirkan kebijakan yang memiliki perspektif pada perempuan. Partai Nasdem yakin bahwa upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat terwujud apabila didukung dengan berbagai aturan yang mengutamakan pemenuhan hak perempuan dan anak-anak.

Dalam pelaksanaannya diharapkan kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat semakin mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Partisipasi dan keterwakilan perempuan sangat membantu dalam mendorong penguatan posisi politik perempuan di parlemen maupun pemerintahan. Penerapan sistem affirmative action atau sistem kuota bagi perempuan sebesar 30% untuk masuk dalam dunia politik banyak menarik perhatian masyarakat dan mulai mengarah pada keberadaan politisi perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Representasi partisipasi politik perempuan dapat menjadi tolak ukur sejauh mana proses demokrasi yang terjadi dalam suatu negara.

Komposisi perempuan dalam Partai Nasdem, secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi patokan sejauh mana peran perempuan dalam Partai Nasdem berhasil mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap representasi politik kaum perempuan. Peran perempuan dalam partai politik belum terlalu signifikan, tetapi sudah menunjukkan adanya keterwakilan perempuan dan membangun kesadaran bahwa posisi serta komposisi perempuan dalam partai politik maupun parlemen sangat penting dalam mempengaruhi hasil kebijakan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dalam wawancara :

“Partai Nasdem lebih mengistimewakan keberadaan perempuan dan kebetulan calon legislative Partai Nasdem Kabupaten Jepara yang didaftarkan ke KPU untuk pemilu tahun 2024 sejumlah 19 perempuan dari total 50 caleg dan jelas sudah melebihi kuota 30% keterwakilan perempuan. Jadi tinggal nanti bagaimana memberdayakan kaum perempuan agar dapat memasuki kursi di DPRD Kabupaten Jepara dengan menyakinkan konstituen dan masyarakat bahwa perempuan dapat memberi pelayanan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat” (wawancara, Bapak Pratikno, 18 Mei 2023).

Kemudian Ibu Farah Elfirajun juga menambahkan dalam wawancara, sebagai berikut :

“Peluang dan kesempatan perempuan relative sangat besar dibandingkan dengan kaum laki laki. Namun, sangat disayangkan keinginan dan hasrat dari kaum perempuan untuk memasuki dunia politik masih sangat kurang. Dalam setiap pengambilan keputusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara selalu mengajak dan melibatkan perempuan dalam segala kegiatan rapat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan rapat sesuai dengan bidangnya.” (wawancara, Ibu Farah Elfirajun, 15 April 2023).

Diberlakukannya sistem perekrutan politik secara semi terbuka bagi komposisi perempuan dalam Partai Nasdem Kabupaten Jepara sangat berdampak secara signifikan terutama dalam penguatan posisi serta komposisi perempuan dalam partai. Dampak tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan komposisi perempuan dalam keterwakilan di parlemen dalam proses pengambilan suara serta peningkatan jumlah anggota perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum. Peran politik perempuan menjadi faktor

pendorong dan penguat posisi perempuan dalam partai walaupun belum sepenuhnya membawa kontribusi, karena kebijakan yang telah ditetapkan dianggap cenderung hanya menjalankan keinginan elit politik dan tidak ada kelanjutan dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Namun, dengan adanya peran perempuan dalam dunia politik dianggap sudah cukup untuk mewakili suara perempuan.

B. Peran Perempuan dalam Partai Nasdem Kabupaten Jepara

Peran perempuan dalam dunia politik masih sangat terbatas dan cenderung diabaikan. Partai politik cenderung didominasi oleh budaya patriarkial sehingga peran perempuan sangat tertinggal. Peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara merupakan sebuah bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi dan peran politik perempuan di negara-negara berkembang terutama Indonesia cenderung rendah dibandingkan dengan partisipasi politik laki-laki. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap cenderung lebih terlibat dalam urusan rumah tangga dibandingkan urusan politik, sehingga secara politis sosialisasi terkait peran perempuan cenderung menempatkan perempuan untuk mendapatkan status tertentu tanpa usaha sebelumnya.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik sangat erat dikaitkan dengan usaha dan akses terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki kekuasaan mempunyai akses besar untuk dapat mencapai jabatan tertentu dalam struktur politik dan pemerintahan. Namun, keuntungan potensial untuk memenangkan persaingan jabatan dalam struktur politik maupun pemerintahan dengan laki-laki tetap gagal dalam mengimbangi kesetaraan dan hambatan bagi perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik. Realitanya di Kabupaten Jepara partisipasi dan peran perempuan dalam dunia politik sangat jauh dari harapan, perempuan banyak mendapat penolakan serta masih banyak sebagian dari kalangan perempuan yang belum siap memberi dukungan serta simpati kepada sesama kaum perempuan ketika bersaing dalam kompetisi politik.

Perselisihan dalam dunia politik dapat dipengaruhi dan mempengaruhi siapa saja, sehingga persoalan ini perlu penekanan dari kaum perempuan untuk saling memberikan dukungan dan kepercayaan kepada sesama perempuan. Dukungan tersebut merupakan upaya pembelaan untuk menghilangkan budaya patriarkal yang semakin mendominasi. Posisi perempuan memiliki peran penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang sering terjadi di masyarakat, seperti: diskriminasi dalam lingkungan tempat kerja, diskriminasi di hadapan hukum, dan diskriminasi dalam keluarga berencana.

Pendanaan yang digunakan dalam melaksanakan berbagai program Kerja Garda Wanita Malahayati Kabupaten Jepara berasal dari biaya swadaya dan bantuan pembiayaan dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara. Berdasarkan fakta yang didapati di lapangan, kader anggota Garda Wanita Malahayati belum tentu menempati posisi strategis dalam struktur kepengurusan internal Partai Nasdem Kabupaten Jepara. Kader anggota Garda Wanita Malahayati kebanyakan berasal dari perempuan yang menjadi relawan Partai Nasdem. Oleh karena itu, tidak semua kader perempuan yang menjadi pengurus dalam struktur keanggotaan Garda Wanita Malahayati dapat berperan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagian banyak terhambat karena berbagai permasalahan internal sehingga masih banyak anggota Garda Wanita Malahayati yang belum dapat berperan secara penuh sehingga menjalankan peranan secara pasif.

Sesungguhnya peran politik perempuan sangat penting karena diperkuat oleh beberapa argumen. Berdasarkan sisi demokrasi, jumlah perempuan setengah lebih banyak dari jumlah keseluruhan penduduk, sehingga menjadi sebuah kewajiban perempuan menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan konstituennya. Selanjutnya berdasarkan sisi kesetaraan, keterwakilan perempuan terhadap sesama perempuan diumpamakan sebagai

keterwakilan terhadap tuntutan atas asas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Selanjutnya, berdasarkan sisi pemakaian sumber daya, yakni menggunakan kemampuan intelektual kaum perempuan sebagai pemikir yang kritis dan lebih cermat dalam menentukan sebuah keputusan. Sedangkan dari sisi keterwakilan perempuan, banyak ditunjukkan oleh penelitian empiris bahwa perempuan yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, membuat kepentingan perempuan tidak dipertimbangkan dan justru merugikan kaum perempuan.

a. Peran Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara kepada Masyarakat

Keterlibatan perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun, perempuan dipandang masyarakat memiliki karakteristik yang lemah, tidak kompeten, dan tidak mandiri. Oleh karena itu, perlu diperlihatkan kembali terkait gambaran perempuan yang mampu mengatasi kondisi tersebut sehingga budaya penindasan dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan seperti ini harus hilang. Selain itu, perempuan memiliki kemampuan setara seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki untuk mengembangkan lingkungan dan memberikan pengaruh besar serta arahan kepada masyarakat. Peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara kepada masyarakat sudah jelas terlihat dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara bertahap. Namun dalam perkembangannya banyak program kerja yang masih terus dilakukan perubahan agar seluruh elemen masyarakat secara keseluruhan dapat terbantu. Sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat belum terlalu signifikan.

Ketertinggalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang menghambat perempuan untuk dapat berperan lebih. Seperti konstruk sosial dan budaya dalam masyarakat, pengalaman dan pengetahuan politik-sosial yang kurang, hambatan geografis, hingga hambatan terkait

peraturan. Jika diamati lebih dalam, kenyataannya terjadi efek domino yang diakibatkan oleh keterlibatan peran perempuan dalam partai politik yang dapat berimplikasi terhadap implementasi kesetaraan gender yang merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem demokrasi. Sehingga, diharapkan dengan adanya peran perempuan dapat semakin mendorong dan meningkatkan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak-anak, sehingga kebijakan tersebut dapat mendukung proses penyelesaian konflik yang terjadi secara persuasif, sebab sifat dasar dari perempuan pasti akan lebih memilih proses secara damai.

Peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara kepada masyarakat lebih aktif dalam membahas isu terkait kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai agen perubahan bagi masyarakat Jepara Garda Wanita Malahayati semakin menunjukkan diri dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial seperti kegiatan relawan donor darah, pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, kegiatan bakti sosial, kegiatan penyuluhan kepada anak stunting, dll. Kepedulian perempuan dalam Partai Nasdem dibuktikan dengan tindakan sosial melalui program kerja salah satunya dengan dibukanya posko pengaduan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pendirian posko pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan dilakukan karena mengingat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jepara yang masih sangat tinggi. Posko ini diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan edukasi, memfasilitasi dan memberikan media terutama kepada masyarakat terkait permasalahan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara untuk menangani masalah tersebut. Posko ini tidak hanya menerima pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan tetapi juga

memberikan pelayanan kepada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gambar 2 Launching dan Sarasehan Posko Pengaduan Kekerasan Seksual dan KDRT



Sumber : Partai Nasdem Jateng

Posko layanan ini diresmikan dan dibuka oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara pada tanggal 7 Maret 2022. Peresmian posko ini mendapat banyak dukungan dan komitmen dari berbagai lembaga dan instansi seperti Polres, Gabungan Organisasi Wanita, DP3AP2KB, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Lembaga ini menjadi rujukan bagi korban yang ingin melapor dan mendapatkan pendampingan serta bantuan hukum. Diharapkan lembaga dan instansi tersebut dapat bersama-sama merespon berbagai kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Kabupaten Jepara.

Ibu Farah Elfirajun selaku Ketua Garda Wanita Malahayati DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menjelaskan dalam wawancara :

“Dengan diresmikannya posko pengaduan kekerasan seksual di Kabupaten Jepara ini menjadi wujud kepedulian Partai Nasdem pada para korban yang mengalami kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak-anak. Partai Nasdem sangat peduli terhadap kekerasan seksual dan menjadi salah satu partai yang ikut

mendukung jalannya proses pengesahan dan penetapan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sebagai bentuk kepedulian Partai Nasdem kepada masyarakat terutama perempuan diharapkan dengan adanya posko pengaduan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Untuk jadwal layanan piket tersedia para pengurus dari Garda Wanita Malahayati pada hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat” (wawancara, Farah Elfirajun, 15 April 2023).

Struktur kepengurusan dari posko pengaduan ini melibatkan seluruh elemen DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara mulai dari pengurus, anggota dan organisasi sayap partai. Sebagai penasihat yakni Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dan Bapak Nur Hidayat selaku Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara serta Ibu Farah Elfirajun selaku Ketua Garda Wanita Malahayati DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara sebagai pembina. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Rita Handayani selaku Sekretaris Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara dalam wawancara.

Partai Nasdem merupakan partai yang sangat peduli terhadap kekerasan seksual dan mendorong pengesahan RUU TPKS. Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem terus mendukung proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) demi Perlindungan Hukum kepada korban dan memberikan perhatian terhadap upaya pengesahan rancangan. Sebagai salah satu organisasi sayap perempuan Garda Wanita Malahayati mendukung pengesahan RUU TPKS dan mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di setiap provinsi sebagai salah satu upaya untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual. Selain mendorong proses pengesahan RUU TPKS, Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara juga memberikan fasilitas bagi kepulauan perempuan pekerja migran Indonesia bernama Juliyem yang sudah 8 tahun terhambat kepulangannya karena mendapat masalah di Negara Malaysia.

**Gambar 3 Proses Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia oleh Garda Wanita
Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara**



Sumber : Partai Nasdem Jateng

Sejalan dengan komitmen partai Nasdem untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran dan tenaga kerja wanita (TKW) karena memiliki peran yang besar bagi perekonomian negara atau sebagai pahlawan devisa. Garda Wanita Malahayati sebagai sebuah organisasi sayap partai Nasdem memiliki kontribusi dan peran sosial kepada masyarakat terutama perempuan sehingga peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati sangat penting untuk memberikan bantuan baik pendampingan maupun pemberdayaan kepada perempuan dan anak. Partai Nasdem berinisiatif untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia terutama kaum perempuan mengingat perempuan sangat rentan mengalami tindak diskriminasi dan kekerasan.

Kepedulian Partai Nasdem melalui Garda Wanita Malahayati memiliki harapan besar agar permasalahan yang menghambat para pekerja migran Indonesia terutama perempuan dapat ditangani secara bersama. Partai Nasdem berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih

kepada calon pekerja migran Indonesia melalui kegiatan sosialisasi terkait kelengkapan dokumen mengingat pentingnya dokumen asli. Selain itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh agar dapat menjamin perlindungan pekerja migran.

b. Peran Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara Kepada Institusi Partai

Dalam menganalisa sistem politik, partisipasi politik terutama peran politik perempuan dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur seberapa besar proses demokrasi yang sedang berlangsung di negara tertentu. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik di sebuah negara. Masyarakat modern akan selalu aktif bergerak dalam memberikan pendapat yang berpengaruh untuk memberi tekanan kepada pemerintah terkait setiap kebijakan yang diputuskan.

Proses berpendapat tersebut memberikan pengaruh yang kemudian di sebut sebagai bentuk partisipasi politik oleh masyarakat. Negara demokrasi dapat dinyatakan baik apabila tingkat partisipasi politik masyarakatnya tinggi, hal ini menunjukkan bahwa warga negara dapat memberikan pemahaman dan mengikuti permasalahan, serta adanya keinginan untuk ikut serta di dalam kegiatan yang ada dalam pemerintahan. Sebaliknya negara dapat dianggap kurang baik apabila partisipasi masyarakatnya rendah, karena dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memberi perhatian terhadap permasalahan negara.

Peran perempuan dalam DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara cenderung masih rendah, karena fungsi dari Garda Wanita Malahayati belum dapat berjalan secara maksimal sebagai pendorong atau penguat bagi politik kaum perempuan. Garda Wanita Malahayati seharusnya dapat menjadi sarana bagi partai Nasdem untuk mendorong pelaksanaan reformasi yakni Restorasi Indonesia dalam meningkatkan keterwakilan

perempuan dan peran perempuan di partai politik, termasuk meningkatkan jumlah legislator perempuan dalam pemerintahan. Peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara memberikan kontribusi kepada institusi partai dalam pengembangan kebijakan, mendorong kepentingan anak dan perempuan.

Program kerja yang dilakukan oleh Garda Wanita Malahayati difokuskan terhadap pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, pengusulan kebijakan dan saran terkait isu kesetaraan gender, melaksanakan fungsi partai sebagai sarana sosialisasi dan mobilisasi untuk menjangkau pemilih perempuan dan memperkenalkan partai di masyarakat, memberikan pemahaman dan kontribusi sebagai upaya untuk membangun dan membentuk hubungan kekuasaan dalam partai, serta mengadakan kegiatan pelatihan kepada kader partai terkait program berbasis kesetaraan gender. Meski demikian, Garda Wanita Malahayati harus lebih memperhatikan isu gender serta permasalahan gender yang dapat menjadi awal terpecahnya politisi perempuan dalam partai politik.

Dalam mensosialisasikan kesetaraan gender Garda Wanita Malahayati sudah berusaha secara penuh, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ada hambatan dalam pelaksanaannya sehingga dirasa masih kurang maksimal. Garda Wanita Malahayati bukan hanya sebagai organisasi pelengkap yang berfungsi sebagai penarik suara dan dukungan dari kaum perempuan, tetapi Garda Wanita Malahayati berfungsi sebagai pendorong pelaksanaan mekanisme rekrutmen politik serta proses kaderisasi dalam partai politik. Namun, Garda Wanita Malahayati mengalami hambatan karena terjadinya keterbatasan ruang gerak, sehingga diharapkan Partai Nasdem dapat merevitalisasi peran Garda Wanita Malahayati sebagai organisasi mandiri, yang lebih terstruktur dan memiliki peran serta tanggung jawab yang jelas sehingga dapat memberikan dukungan secara maksimal.

Sebagai organisasi sayap politik perempuan Garda Wanita Malahayati harus diberikan kewenangan secara mutlak dalam merumuskan kebijakan dan menentukan keputusan partai serta ikut berpartisipasi dalam mekanisme rekrutmen politik partai. Sehingga, Garda Wanita Malahayati dapat berperan secara maksimal bagi institusi partai, terutama dalam penguatan kapasitas perempuan dan memperluas jaringan advokasi sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran politik kaum perempuan, demi mendorong keterwakilan perempuan serta mengaktifkan kembali komunikasi kaum perempuan sebagai upaya dalam mewujudkan isu kesetaraan gender.

**Gambar 4 Konsolidasi dan Pelantikan Pengurus Garda Wanita Malahayati
Partai Nasdem Kabupaten Jepara**



Sumber : Partai Nasdem Jateng

Berdasarkan kegiatan diatas dapat dilihat bagaimana peran perempuan dalam Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem kepada institusi dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam mewakili suara perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan dirasa memiliki sifat kepekaan perasaan yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kepedulian tersebut membuat

perempuan dapat menentukan kebijakan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Sehingga, Partai Nasdem memberikan kesempatan dan keistimewaan khusus bagi perempuan yang ingin terjun dalam ranah politik, sehingga diharapkan peran serta partisipasi perempuan dapat mengalami peningkatan demi mewakilkan suara perempuan. Pembentukan Garda Wanita Malahayati didasarkan pada pemikiran kesetaraan gender. Dimana perempuan diberikan ruang bebas dalam menentukan sistem politik dan keterlibatan dalam setiap aktivitas politik sebagaimana dilakukan oleh kaum laki-laki.

Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia banyak menghadapi tantangan dan hambatan terutama dalam pergerakan perempuan. Sehingga terus mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Diharapkan perempuan mampu menanggapi tekanan yang diperlakukan secara diskriminatif, maupun kesenjangan yang dirasa membawa ketidakadilan dalam sebuah partai politik secara rasional. Sehingga tidak menimbulkan konflik dalam internal partai. Kondisi tersebut mengharuskan perempuan memiliki jiwa besar untuk memasuki dunia politik, terutama dalam pengalaman berorganisasi. Saat ini jarang ditemui perempuan yang ingin berpartisipasi dan berperan dalam partai politik, sehingga menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh organisasi politik yang ingin memperjuangkan dan memberdayakan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Peran Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara dalam Kebijakan afirmasi dalam bidang politik mulai diberlakukan kepada perempuan setelah ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, dan DPRD. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan didasari oleh Pasal 55 dan 56 UU Pemilu, dengan diberlakukannya sebuah ketentuan bagi partai politik untuk

memperhatikan keterwakilan perempuan setidaknya sebesar 30% dalam partai politik.

Selanjutnya, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 7 Tahun 2013 pasal 27 ayat (1) tentang affirmative action, menyebutkan bahwa partai politik yang belum dapat mencukupi ketentuan 30%, dinyatakan belum dapat memenuhi syarat untuk mengajukan daftar calon pada pemilihan umum. Adanya peraturan ini membuat partai politik untuk dapat memenuhi syarat dan ketentuan pemilu legislative, meskipun dalam realitasnya partai politik belum dapat sepenuhnya memenuhi keterwakilan perempuan (Mayrudin, 2014). Kebijakan yang dibuat untuk mendorong penguatan peran perempuan sebagai pengurus dalam partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, diharuskan sebagai syarat keikutsertaan partai politik dalam mengajukan calon legislative di setiap daerah pemilihan.

Tuntutan keterlibatan peran perempuan dalam politik, biasanya didasari pada kepentingan untuk memperjuangkan hak perempuan di legislative sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan keterwakilan perempuan dalam jabatan di partai politik. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghidupkan peran perempuan dalam dunia politik. Usaha yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan serta mendorong peran kepemimpinan perempuan, dalam berbagai struktur jabatan publik secara strategis masih menjadi agenda bersama yang harus terus diupayakan pelaksanaannya.

Salah satunya dalam konteks peran perempuan di partai politik dan legislatif. Pernyataan terkait politik merupakan lingkungan lelaki jika dihubungkan dengan konsep perempuan merupakan hal yang saling bertentangan. Dikarenakan konsep maskulinitas dalam ranah politik merupakan suatu hal yang berlawanan dengan konsep feminitas. Namun, peran perempuan sangat dibutuhkan karena berperan penting dalam dunia politik untuk menyuarakan dan mewakili aspirasi perempuan. Sehingga

diharapkan dengan adanya keterwakilan perempuan maka kebijakan politik yang muncul lebih ramah terhadap perempuan dan anak-anak.

Keberadaan partai politik dalam mengupayakan dan memperjuangkan isu kesetaraan gender di lembaga legislative dirasa masih kurang maksimal dan cenderung lepas tangan. Pada akhirnya partai politik tetap kembali ke karakter sebenarnya yang mementingkan oligarki dan berbagai kepentingan pragmatis lainnya yang dianggap dapat merugikan perempuan. Kultur politik Indonesia cenderung patronatif sehingga membuat publik kesulitan untuk menerima keadaan politisi perempuan yang memenuhi standar berkualitas, integritas dan kapabilitas. Pemahaman gender sebagai sebuah struktur sosial terkait ekonomi, politik dan budaya berada dalam sistem patriarki, sehingga membuat lemahnya posisi perempuan dalam kultur politik. Kehadiran perempuan dalam ranah politik termasuk lembaga legislative masih belum dapat membawa perubahan secara signifikan.

Partai Nasdem menyadari bahwa peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan pembuatan kebijakan sangat penting. Perempuan harus dapat memahami berbagai permasalahan sosial yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengetahui jalan keluar untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. Namun, aspirasi perempuan banyak yang tidak tersampaikan dan justru tidak dihiraukan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan, karena kurangnya suara dari perempuan. Sehingga diperlukan ruang representative yang nantinya dapat menampung aspirasi dari kaum perempuan.

Ditengah berbagai usaha yang telah dilaksanakan, tidak bisa kita hindari bahwa tantangan tersebut menghadirkan berbagai permasalahan dalam lingkungan sosial dan kepentingan untuk mengutamakan kesetaraan gender dalam struktur politik inklusif masih banyak mengalami hambatan. Oleh karena itu DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara memberikan ruang bagi perempuan secara terbuka untuk dapat berperan dan berpartisipasi

tidak hanya dalam sektor politik melainkan juga dalam kegiatan ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan. Selain itu, Partai Nasdem menjadi salah satu partai politik baru yang dinyatakan lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi administrasi dan faktual pada tingkat pusat sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, sehingga berhasil mewujudkan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sehingga dapat lolos dalam kontestan pemilu tahun 2014 dan 2019.

Dalam konstentasi pemilihan umum legislative tahun 2014 di Kabupaten Jepara, DPD Partai Nasdem berhasil memenangkan 5 kursi di DPRD Kabupaten Jepara. Salah satunya terdapat perwakilan perempuan yakni Ibu Fitriyahwati Aisyah. Dengan hasil kinerja yang semakin meningkat membuat Fraksi Partai Nasdem menjadi salah satu partai yang semakin diperhitungkan keberadaannya, sehingga pada tahun 2019 Partai Nasdem kembali memenangkan calon legislative perempuan yakni Ibu Yunita Tri Hariyani.

Gambar 5 Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jepara



Sumber : Partai Nasdem

Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menjelaskan dalam wawancara :

“Bagaimana memberi kebijakan yang pro kedalam rakyat jika tidak memiliki jabatan didalamnya, sehingga Partai Nasdem bertekad untuk berjuang dan bergerak bersama kader partai agar saling bersatu untuk memenangkan kursi bagi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Jepara. Pada pemilu tahun 2014 melalui Fraksi Partai Nasdem 5 anggota DPRD ditekankan turun secara langsung kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi dan menjalankan realisasi kebijakan sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya. Seiring berjalannya waktu Partai Nasdem semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat di Kabupaten Jepara. Berdasarkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2019 Partai Nasdem mendapatkan tambahan 2 kursi sehingga menjadi 7 kursi. Sejak tahun 2014 ada perempuan yang menempati kursi Fraksi Partai Nasdem di kabupaten Jepara yakni Ibu Fitriyahwati Aisyah dan pada tahun 2019 ada satu perempuan lagi yaitu Ibu Yunita Tri Hariyani. Namun setelah satu tahun kepengurusan beliau harus berhenti menjabat dan sesuai aturan diadakan pergantian antar waktu sehingga digantikan oleh Bapak Jumari. Sehingga pada tahun 2024 Partai Nasdem berharap dapat memenangkan semakin banyak kader perempuan dan membuktikan kader-kader perempuan yang terbaik untuk dapat menempati kursi di DPRD Kabupaten Jepara” (wawancara, Bapak Pratikno, 18 Mei 2023).

C. Analisis Terhadap Teori Kolateral Partai Thomas Poguntke

Partai politik berperan penting dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berproses di dunia politik. Partai politik mendukung peranan perempuan melalui keikutsertaan dalam proses pemilihan umum, pencalonan kandidat perempuan dan mendorong berbagai kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam partai politik. Garda Wanita Malahayati sebagai organisasi sayap partai perempuan, secara electoral memiliki peran strategis untuk mengagregasi berbagai kepentingan perempuan dan mendekatkan pemilih perempuan dengan partai politik.

Organisasi sayap partai perempuan memiliki peran penting bagi partai politik dalam menyediakan sumber perekrutan politik agar memenuhi keterwakilan perempuan. Sehingga dapat dilihat adanya hubungan antara organisasi sayap partai dengan partai politik sebagai kunci dalam mendorong dan memperkuat keterwakilan perempuan. Keberadaan organisasi sayap perempuan di Indonesia belum banyak mengambil kontribusi dalam

mendorong keterwakilan perempuan, baik dalam internal partai politik maupun dalam proses elektoral. Faktor utama yang menghambat peran organisasi sayap perempuan dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki dalam internal partai.

Garda Wanita Malahayati difungsikan sebagai organisasi kolateral yang memiliki peran penting dalam memobilisasi dukungan pemilih perempuan dalam politik electoral, menjaring politisi perempuan, memperjuangkan kepentingan perempuan. Namun, secara eksklusif substansi Garda Wanita Malahayati tereksklusi dari struktur formal kekuasaan terutama dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam partai politik. Hal ini mengindikasikan adanya pola hubungan yang bersifat kolateral dan formal yang memungkinkan organisasi sayap perempuan untuk dapat membangun representasi sosial dalam kalangan pemilih perempuan, namun hal tersebut juga dapat menjadi potensi yang membatasi perempuan dalam upaya mendorong agenda keterwakilan perempuan di partai Politik.

Partai Nasdem membentuk Garda Wanita Malahayati sebagai organisasi sayap partai khusus perempuan, salah satunya sebagai sarana untuk mengagregasi berbagai kepentingan dan kebutuhan perempuan terhadap politik perempuan. Garda Wanita Malahayati sebagai sarana rekrutmen politik bagi perempuan yang ingin mencalonkan diri dalam parlemen baik di lembaga eksekutif maupun legislative, yang jelas memiliki kebijakan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam proses pencalonan pemilihan umum legislative. Selanjutnya, sebagai rangka penguatan bagi Partai Nasdem dikalangan pemilih perempuan dan masyarakat. Keberadaan Garda Wanita Malahayati dalam struktural Partai Nasdem menjadi sarana agregasi dan artikulasi kebijakan partai politik terkait dengan isu perempuan serta menjadi sarana representatif bagi keterwakilan perempuan.

a. Bentuk Hubungan Organisasi Kolateral Partai

Diketahui bahwa hubungan antara Garda Wanita Malahayati dengan Partai Nasdem dapat dilihat berdasarkan bentuk hubungan, fungsi dan pengaruh Garda Wanita Malahayati kepada Partai Nasdem. Garda Wanita Malahayati merupakan sarana bagi perempuan untuk masuk dalam pemilihan umum, memberi dukungan demi terpilihnya kandidat perempuan, mendorong berbagai agenda kebijakan terkait keterwakilan perempuan, membantu pelaksanaan berbagai kebijakan partai khususnya bagi kaum perempuan dan menjadi sumber daya kader partai serta basis massa dari berbagai segmen lapisan masyarakat.

Bentuk hubungan antara organisasi sayap partai dengan partai politik sebagian besar didasari oleh proses agregasi dan artikulasi kepentingan yang dicapai tanpa melibatkan elit politik partai. Keterhubungan organisasi memberikan fasilitas komunikasi secara dua arah antara elit partai politik dengan pemilih yang dihubungkan melalui organisasi sebagai pertukaran mobilisasi pemilu untuk memberikan respon terhadap kebijakan tertentu. Berdasarkan hubungan organisasi sayap perempuan dengan partai politik, Garda Wanita Malahayati selalu menyorot isu terkait representasi politik perempuan.

Bentuk hubungan yang terjadi antara Garda Wanita Malahayati dengan Partai Nasdem bersifat formal. Hal tersebut ditandai oleh keterlibatan keanggotaan ganda Garda Wanita Malahayati dalam struktur internal partai dan badan penetapan kebijakan partai. Garda Wanita Malahayati tetap terlibat dalam pembuatan keputusan besar seperti Konsolidasi, Rapat Kongres dan Rakernas. Namun, dalam penetapan kebijakan strategis Garda Wanita Malahayati tidak selalu terlibat.

Adanya pola keterhubungan organisasional yang bersifat formal antara Garda Wanita Malahayati dan Partai Nasdem. Hubungan formal antar organisasi sayap partai melibatkan reaksi terhadap tekanan yang

didasarkan pada penetrasi organisasi yakni akses elit organisasi ke badan pembuat keputusan partai. Kemudian pola hubungan yang terjadi secara formal menempatkan organisasi sayap tersebut sebagai organisasi kolateral yang berperan penting dalam pendekatan partai politik dengan pemilih perempuan. Namun, pendekatan tersebut secara formal tetap terstruktur terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam partai politik.

b. Fungsi Organisasi Kolateral Partai

Berdasarkan fungsi Garda Wanita Malahayati sebagai sistem pendukung bagi Partai Nasdem yang dimana berfungsi sebagai sumber rekrutmen, kaderisasi dan pengambilan suara massa, khususnya bagi pemilih perempuan. Sebagai sumber rekrutmen, Garda Wanita Malahayati berfungsi sebagai penghubung antara politisi perempuan dengan lembaga dalam struktur Partai Nasdem, yakni badan pemenangan pemilu Partai Nasdem yang memiliki wewenang strategis untuk menentukan mekanisme rekrutmen, penetapan nomor, dan penempatan daerah pemilihan. DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara menjalankan fungsi rekrutmen secara terstruktur dengan memperhatikan ketentuan sistem rekrutmen anggota partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Nasdem. Proses rekrutmen politik hanya dilakukan oleh organisasi inti, yaitu Partai Nasdem bukan melalui organisasi sayap partai.

Selanjutnya, sebagai fungsi kaderisasi Garda Wanita Malahayati selalu terhubung dengan struktur partai agar dapat mendorong kepentingan perempuan untuk memperjuangkan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dan pro terhadap kesetaraan gender. Sifat kaderisasi dalam organisasi sayap perempuan Garda Wanita Malahayati sesuai dengan fungsi rekrutmen politik yakni untuk menarik dan memperluas keanggotaan partai. Fungsi kaderisasi yang dijalankan oleh

Partai Nasdem dilaksanakan secara ketat dan terpusat hanya oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Selain itu keanggotaan dalam proses kaderisasi tidak menjadi patokan atau syarat mutlak dalam proses pencalonan. Dapat dilihat bahwa tingginya kontrol Partai Nasdem terhadap Garda Wanita Malahayati yang membuat Garda Wanita Malahayati tidak dapat mengambil peranan secara penuh dalam proses rekrutmen maupun kaderisasi karena tidak adanya akses dalam pembuatan dan penetapan kebijakan partai. Proses tersebut sepenuhnya hanya dilakukan oleh internal Partai Nasdem.

Berdasarkan teori organisasi kolateral Thomas Poguntke, Garda Wanita Malahayati dikategorikan sebagai organisasi kolateral afiliasi yang secara strategis lebih difungsikan sebagai pengambil suara massa untuk mensosialisasikan partai kepada pemilih khususnya perempuan. Organisasi kolateral partai tersebut berfungsi untuk mewakili strategi organisasi elit politik yang berusaha untuk mendiversifikasi daya tarik masyarakat. Secara teknis organisasi afiliasi adalah organisasi independen yang terikat dengan partai politik pada tingkat elit melalui struktur kepengurusan dari sistem kepemimpinan organisasi afiliasi dalam badan eksekutif partai.

Selain itu, sebagian keanggotaan ganda dalam Garda Wanita Malahayati dan struktur internal Partai Nasdem menunjukkan bahwa organisasi sayap partai ini memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat diluar konstituen internal partai politik terutama perempuan. Organisasi ini memiliki tingkat otonomi yang bervariasi tetapi jaminan melalui struktur organisasi independen dalam organisasi afiliasi masih sangat minim. Secara eksklusif hubungan Garda Wanita Malahayati dengan Partai Nasdem didasarkan oleh persamaan kepentingan. Meskipun tidak ada jaminan akses bagi Garda Wanita Malahayati dalam pembuat keputusan partai, menjadikan hubungan tersebut sebagai model interaksi organisasi yang memiliki otonomi maksimal.

c. Pengaruh Organisasi Kolateral Partai

Berkaitan dengan pengaruh Garda Wanita Malahayati terhadap Partai Nasdem, minimnya kontribusi Garda Wanita Malahayati dalam posisi strategis partai politik, jelas berpengaruh dalam proses rekrutmen politisi perempuan. Hubungan antara Garda Wanita Malahayati dengan Partai Nasdem tidak hanya sebagai pengambil keputusan dalam pemenangan partai dan mensosialisasikan Partai Nasdem kepada pemilih perempuan. Namun, hubungan tersebut tetap didasari oleh fungsi organisasi sayap partai sebagai sumber rekrutmen dan kaderisasi, sehingga mendorong terciptanya keterwakilan perempuan serta keterlibatan Garda Wanita Malahayati dalam posisi strategis terkait proses rekrutmen dan kaderisasi yang nantinya akan menentukan kualitas serta kuantitas dari kandidat politisi perempuan.

Berdasarkan aspek partisipasi, sebagai organisasi kolateral partai Garda Wanita Malahayati memiliki peran strategis sebagai sarana rekrutmen politisi perempuan dan menghubungkan partai politik dengan pemilih perempuan. Melalui berbagai kegiatan sosial yang dijalankan oleh Garda Wanita Malahayati kepada masyarakat terbukti mampu memobilisasi dukungan massa pemilih perempuan. Sehingga menjadi salah satu modal sosial yang efektif untuk memobilisasi massa dalam proses kampanye. Garda Wanita Malahayati merupakan organisasi sayap partai Nasdem yang memiliki peran penting terutama sebagai sumber rekrutmen politik perempuan dan kaderisasi partai politik.

Pelaksanaan sistem rekrutmen politik melalui Garda Wanita Malahayati sebagai sumber rekrutmen politik Partai Nasdem dianggap lebih efisien dan memiliki keuntungan besar, daripada sistem rekrutmen politik yang dijalankan menggunakan metode penjangkaran diluar organisasi sayap Partai Nasdem. Selain itu, Garda Wanita Malahayati sering mengajukan usulan terkait daftar kandidat perempuan yang berpotensi untuk masuk dalam konstantasi pemilihan umum sebagai salah

satu syarat dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Dapat dilihat bahwa peran yang dilakukan oleh Garda Wanita Malahayati cenderung berjalan sangat dinamis terutama dalam proses pengambilan keputusan di internal partai dan proses elektoral sebagai upaya dalam mendorong keterwakilan perempuan di partai politik.

Sedangkan dalam aspek representasi, bentuk hubungan organisasi yang bersifat informal memungkinkan Garda Wanita Malahayati membangun posisi strategis terhadap Partai Nasdem, sebaliknya semakin melemahnya posisi strategis perempuan dalam organisasi sayap perempuan terhadap partai politik. Dalam aspek elektoral, fungsi organisasi sayap perempuan untuk mendorong dan mendukung penempatan perempuan dalam daftar calon anggota legislative. Keterbatasan sumber politisi perempuan yang memiliki posisi strategis dalam partai politik, mengakibatkan keterbatasan akses terhadap kepentingan politisi perempuan dan minimnya dukungan suara dalam proses kontestsasi pemilihan umum.

Berdasarkan aspek politik internal dalam partai politik, secara kuantitas maupun kualitas hubungan informal menjadi faktor penyebab organisasi sayap perempuan tereklusi dari proses pengambilan suara dalam partai politik. Sehingga, dapat dilihat adanya kesenjangan antara partisipasi dan representasi terhadap organisasi sayap perempuan. Peran organisasi sayap perempuan dianggap sebagai hubungan informal yang dapat membuat posisi mereka semakin kuat, karena berada dalam peran strategis partai untuk mendorong representasi mobilisasi pemilih khususnya perempuan. Namun, hal tersebut nyatanya semakin membuat posisi organisasi sayap partai menjadi semakin melemah dalam menghadapi struktur kekuasaan maupun sebagai upaya untuk mendorong agenda keterwakilan perempuan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul **Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik (Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019)**, maka dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Partai Nasdem memiliki sistem rekrutmen keanggotaan yang sudah disesuaikan dengan ideologi partai dan diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasdem melalui surat keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: SKEP-004/DPP-NasDem/II/2013. DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara memakai pola gabungan secara semi terbuka yakni menggunakan sistem rekrutmen secara terbuka dan rekrutmen secara tertutup. Mekanisme perekrutan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem bertujuan untuk menciptakan kandidat politisi yang memiliki kredibilitas, kompetibel, berintegritas dan loyalitas kepada organisasi.

Pelaksanaan sistem rekrutmen politik melalui Garda Wanita Malahayati dianggap lebih efisien dan memiliki keuntungan besar, daripada sistem rekrutmen politik yang dijalankan menggunakan metode penjangkaran diluar organisasi sayap partai Nasdem. Sistem rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara jelas sangat memperhatikan keberadaan perempuan dengan adanya program kerja berbasis kesetaraan gender yang melibatkan peran perempuan dalam berbagai proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan.

Pemahaman terkait kesetaraan gender terus diperjuangkan oleh Partai Nasdem sebagai usaha untuk memenuhi hak dan kewajiban perempuan. Strategi yang perlu dilakukan oleh partai politik untuk mewujudkan kesetaraan gender yakni dengan meningkatkan partisipasi dan

memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam ruang politik. Semakin banyaknya perempuan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan di ruang publik, maka akan semakin banyak melahirkan kebijakan yang memiliki perspektif pada perempuan.

Hambatan dan kendala yang dialami oleh Garda Wanita Malahayati dalam menjalankan fungsi kaderisasi diakibatkan oleh keterbatasan wewenang dalam proses rekrutmen politik. Garda Wanita Malahayati memiliki wewenang sebagai pelaksana kebijakan dalam membuat kegiatan sesuai dengan rancangan kerja yang telah disepakati dalam internal partai. Namun, rancangan kerja tersebut bersifat tidak terstruktur dan dirasa belum terlembaga secara baik karena dilaksanakan secara spontan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, masih banyak terjadi kekosongan keanggotaan dalam struktur organisasi Garda Wanita Malahayati sehingga dianggap belum dapat berperan secara maksimal.

Komposisi perempuan dalam Partai Nasdem, secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi patokan sejauh mana peran perempuan dalam partai politik berhasil mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap representasi politik kaum perempuan. Diberlakukannya sistem perekrutan politik secara semi terbuka bagi komposisi perempuan dalam Partai Nasdem Kabupaten Jepara sangat berdampak secara signifikan terutama dalam penguatan posisi serta komposisi perempuan dalam partai.

Dampak tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan komposisi perempuan dalam keterwakilan di parlemen dalam proses pengambilan suara serta peningkatan jumlah anggota perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum. Peran politik perempuan menjadi faktor pendorong dan penguat posisi perempuan dalam partai walaupun belum terlalu signifikan membawa kontribusi, tetapi sudah menunjukkan adanya keterwakilan perempuan dalam membangun kesadaran bahwa posisi serta komposisi perempuan di partai politik maupun parlemen sangat penting untuk mempengaruhi hasil kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan kepada peneliti dalam bidang sejenis yang akan mengembangkan atau melanjutkan penelitian terhadap DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara, Sebagai berikut :

2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian sejenis, disarankan agar dapat lebih mengembangkan serta mengeksplorasi studi kasus secara mendalam, dengan mengaitkan beberapa aspek yang belum dikemukakan dalam penelitian ini agar lebih memfokuskan pembahasan terhadap peran rekrutmen politik dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara.
3. Untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara dan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara, Partai Nasdem seharusnya dapat menjadi organisasi yang berfokus terhadap kualitas dibandingkan kuantitas dengan membentuk tim seleksi yang lebih kompetitif dan bebas dari berbagai intervensi kepentingan elit partai. Sehingga diharapkan Partai Nasdem dapat menjaring sumber daya manusia yang nantinya akan melahirkan politisi yang memiliki kualitas dan integritas. Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Partai Nasdem membuat proses rekrutmen sangat terbatas dan pedoman awal yang telah ditentukan oleh partai menjadi tidak bermakna karena tidak dapat dijalankan secara semestinya. Melalui slogan restorasi Indonesia dan partai tanpa mahar Partai Nasdem seharusnya dapat lebih menunjukkan diri sebagai partai reformasi yang transparan dan demokratis dan tidak cenderung menjadi partai yang hanya berjalan di tempat saja. Secara ideal Partai Nasdem belum dapat mengimplementasikan mekanisme perekrutan politik sesuai dengan kaidah manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, masih diperlukan tata cara dan pedoman dalam proses seleksi yang lebih ideal bagi Partai Nasdem.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amal, D. I. (1996). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Arianto, B. (2019). Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta. *International Jurnal of Demos*, 1-23.
- Arianto, B. (2019). Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta. *International Jurnal of Demos*, 1-23.
- Bernay, C. D. (1998). *Women In Power*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Berry, D. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018). *30 Keterampilan Esensial; untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dalton, R. J. (1994). *The Green Rainbow. Environmental Groups in Western Europe*. New Haven: Yale University Press.
- Effendi, W. R. (2019). Representasi Politik Perempuan di Partai Nasional Demokrat. *Jurnal Dimensi*, 516-526.
- Fakih, M. (1996). *Membincang Feminisme : Diskursus gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Haqiqi, P. (2014). Pelembagaan Partai NasDem (Studi Kasus Pelembagaan DPD Partai NasDem Kota Surabaya dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3*, 422-433.
- Hikmawan, M. D. (2016). Depoliticisation of Public Issue : Low Degree of Government ' S Democratic Legitimacy. *Journal of Governance*, 23-37.
- Irfan, A. W. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Juergensmeyer, M. (2003). *Terorisme Para Pembela Agama*. Yogyakarta: Terawang Press.
- Karim, R. (1991). *Pendidikan Islam antara Fakta dan Cita*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud, H. G. (2013). *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata.
- Mansour Faqih. (2010). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Mayrudin. (2014). Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi : Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 163-185.
- Miles, A. H. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. . (T. o. (1992), Ed.) Jakarta: Universitas Indonesia.
- Natalia, L. (1990). *Perempuan Dalam Gerakan Politik: Studi Kasus PK. Sejahtera Di Makassar*. Makassar: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar.
- Nugroho. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Ali Roho Talaohu. (2021). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* , 15.
- Poguntke, P. W. (2005). *The Presidentialization of Politics : A Comparative Study of Modern Democracies*. New York: Oxford University Press.
- Poguntke, T. (1992). *Unconventional participation in party politics. The experience of the German Greens*. Political Studies.
- Poguntke, T. (2000). *Parteiorganisation im Wandel. Gesellschaftliche Verankerung und organisatorische Anpassung im europäischen* . Weisbaden: Westdeutscher Verlag.
- Poguntke, T. (2002). *Parties Without Firm Social Roots? Party Organisational Linkage*. Keele European Parties Research Unit (KEPRU).
- Poguntke, T. (2006). *Political parties and Other Organizations dalam buku "Handbook of Party Politics"*. United Kingdom: Sage Publication.
- Poloma, M. M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Pratama, R. (2020). *Partisipasi Elit Politik Perempuan Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palembang Pada Pemilu 2019*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Renhoat, L. (2019). *Peran Perempuan dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik Pada Partai Demokrat di Kota Tual)*. Ambon: Institut Agama Negeri Ambon.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17.

- S. Katz, R. a. (2006). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Sjahril, S. S. (2016). *Politik Perempuan DI Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sugiono. (2001). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, . Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. . Bandung: Alfabeta.
- Weissenbach., K. (2010). *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*. Filipina: Manila Office.
- Wildianti, H. &. (2020). *Partisipasi tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia*. JAKARTA: Pusat Kajian Politik Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Sosial dan Politik (PUSKAPOL LP2SP).
- Yudhistira. (2014). *Pelembagaan Partai Nasdem*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Yulita. (2008). *Peran politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Fakultas Ushulluddin dan Filsafat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Ibu Dra. Farah Elfirajun. AG selaku Ketua Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara



Lampiran 2 Wawancara dengan Ibu Rita Haryani S.Pd selaku Sekretaris Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem Kabupaten Jepara



Lampiran 3 Wawancara dengan Bapak Pratikno selaku Ketua DPD Partai Nasdem
Kabupaten Jepara



Lampiran 4 Wawancara dengan team seleksi DPD Partai Nasdem Kabupaten
Jepara



Lampiran 5 Wawancara dengan sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara



Lampiran 6 Kantor Sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara



Lampiran 7 Surat pengajuan penelitian di DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2559/Un.10.6/K/KM.05.01/10/2022 Semarang, 10 November 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**PERAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (Studi Kasus Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara Tahun 2011-2019)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Liana Oktavia Ningrum
NIM : 1906016079
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Jepara, 7 Oktober 2001
CP/e-mail : Lianaoktavianing@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Misminarso/Rokhayati
Pekerjaan : Wiraswasta/IRT
Alamat : Jl. Tirta Samudra, Bandengan. Jepara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Penelitian di DPD Partai Nasdem Kabupaten Jepara

 Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
KABUPATEN JEPARA

www.partainasdem.org

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saudara :

Nama : Liana Oktavia Ningrum
NIM : 1906016070
Jurusan : Ilmu Politik
CP/e-mail : Lianaoktavianing@gmail.com
Alamat : Jl. Tirta Samudra, Bandengan, Jepara
Keterangan : Telah melakukan penelitian dengan menggunakan instrument wawancara dan pencarian data melalui observasi.
Lokasi : DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara

Mahasiswa tersebut benar-benar melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara. Dengan judul penelitian **PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (Studi Garda Wanita Malahayati Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Jepara tahun 2011-2019)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jepara
Pada tanggal 20 Mei 2023

DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara
Ketua

Dewan Pimpinan Daerah
Partai NasDem
KABUPATEN JEPARA
H. Pratiko

Kantor DPD Partai NasDem Kab. Jepara : Jl. KM Sukri No 66 RT 04 RW 05 Kel. Potroyudan, Kab. Jepara-Jawa Tengah
Hp. 082133603407, 085226314705
e-mail: nasdemjepara@yahoo.co.id

Lampiran 9 Daftar pedoman pertanyaan untuk Garda Wanita Malahayati Partai
Nasdem Kabupaten Jepara

A. Bab 3 Partai Nasional Demokrat

1. Bagaimana sejarah pembentukan DPD Partai Nasdem Kab. Jepara?
 - Dasar pembentukan DPD Partai Nasdem Kab. Jepara? (AD/ART atau pedoman UURI)
 - Pada awal pendirian partai Nasdem Kab. Jepara komponen strukturnya terdiri atas apa saja?
 - Bagaimana struktur organisasi DPD Partai Nasdem Kab. Jepara?
 - Lokasi kantor DPD Partai Nasdem Kab. Jepara?
 - Berapa jumlah seluruh pengurus DPD Partai Nasdem Kab. Jepara?
 - Apa saja program kerja partai Nasdem Kab. Jepara terutama berbasis gender?
2. Bagaimana sejarah pembentukan Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?
 - Dasar pembentukan Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?
 - Apa visi dan misi Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?
 - Bagaimana struktur organisasi Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?
 - Apa saja tujuan dan program kerja organisasi Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?
 - Berapa jumlah seluruh anggota Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?

**B. Bab 4 Sistem Rekrutmen Anggota Partai Nasional Demokrat di
Kabupaten Jepara**

1. Bagaimana sistem rekrutmen anggota partai Nasdem di Kab. Jepara? (Perekrutan, penetapan dan pencalonan, apa alasan diterapkan model tsb)
2. Bagaimana tata cara rekrutmen anggota yang sudah diatur dalam Peraturan Partai (secretariat)?

(Regulasi terkait sistem rekrutmen politik partai Nasdem)

3. Apa saja kriteria khusus bagi para calon anggota partai Nasdem terutama dalam proses rekrutmen perempuan?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh partai Nasdem dalam merekrut kader untuk masuk dalam keanggotaan partai?
5. Bagaimana sistem rekrutmen anggota perempuan Garda Wanita Malahayati Nasdem Kab. Jepara?
6. Bagaimana peran Garda Wanita Malahayati dalam proses rekrutmen anggota politik?
7. Bagaimana proses penempatan kader perempuan sehingga dapat berperan dalam partai politik?
(mekanisme dalam penetapan caleg, mekanisme penjangkaran dan penetapan)
8. Bagaimana peran politik kader perempuan dalam partai Nasdem di Kab. Jepara (Peran pada masyarakat, Institusi partai, lembaga legislative)
9. Apakah perempuan dilibatkan dalam sistem kepengurusan partai dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan?
10. Apakah partai Nasdem Kab. Jepara memiliki kebijakan atau perhatian khusus terhadap keterlibatan kader perempuan?

C. Bab 5 Implikasi diberlakukannya sistem rekrutmen terhadap komposisi perempuan di Partai Nasional Demokrat

1. Apakah dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik partai Nasdem sudah menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender?
2. Bagaimana dampak diberlakukannya sistem perekrutan terhadap komposisi perempuan di Partai Nasdem?
3. Bagaimana dampak diterapkannya sistem tersebut bagi internal partai (aktivis, pengurus) dan eksternal partai (Garnita)?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi sistem rekrutmen politik di partai Nasdem?

5. Bagaimana solusi yang dilakukan partai Nasdem jika ada kendala dalam pelaksanaan sistem rekrutmen?
6. Apakah sistem rekrutmen dan strategi yang dilakukan partai Nasdem selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Liana Oktavia Ningrum
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 7 Oktober 2001
3. Alamat : Jl. Tirta Samudra, RT 013/RW 004 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
4. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. No. Hp : 085728162498
7. Email : Lianaoktavianing@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Bangsa Tahun 2006-2007
2. SDN 2 Bandengan Tahun 2007-2013
3. SMPN 2 Jepara Tahun 2013-2026
4. SMAN 1 Jepara Tahun 2016-2019

C. Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Ilmu Politik Divisi Mangkang Ceria (2020-2021)
2. Sekretaris II UKM-F Fisip Sport Club (FSC) (2020-2021)
3. Sekretaris I UKM Walisongo Sport Club (WSC) (2021-2022)
4. Staff Kemetrian Dalam Negeri DEMA FISIP (2021-2022)